



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata
Kabupaten Sukoharjo

LAPORAN AKHIR

PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

KABUPATEN SUKOHARJO

2023



CV. TERAKOTA SOLUTAMA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tahapan Laporan Akhir Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sukoharjo 2023.

Pada Laporan Akhir ini terdiri atas hasil dari perhitungan indikator – indikator yang menjadi Penyusun dari Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Laporan Akhir ini juga tersusun atas kerangka teori baik normatif, teoritis dan empiris sebagai pendukung kajian.

Laporan ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan dokumen ini dapat dilakukan sesuai jadwal. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sukoharjo, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	5
1.2.1 Maksud.....	5
1.2.2 Tujuan	5
1.2.3 Sasaran	5
1.3 RUANG LINGKUP	7
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.3.2 Ruang Lingkup Substansi.....	7
1.4 DASAR HUKUM	7
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB 2 PROFIL WILAYAH DAN PROFIL KEPEMUDAAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO	10
2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	10
2.1.1 Aspek Geografis.....	10
2.1.2 Aspek Demografi	13
2.1.3 Aspek Ekonomi.....	18
2.2 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA.....	23
2.2.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional.....	23
2.2.2 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah.....	26
2.2.3 Isu Strategis Pemuda Kabupaten Sukoharjo	27
BAB 3 KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI	29
3.1 KERANGKA TEORITIS.....	29

3.1.1	Pemuda	29
3.1.2	Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	32
3.1.3	Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda.....	34
3.2	METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN	39
3.2.1	Tahapan Persiapan	39
3.2.2	Tahapan Pengumpulan Data	41
3.2.3	Tahapan Perhitungan Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo...	45
3.2.4	Tahapan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi ..	49
BAB 4	PENUTUP.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.....	11
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	14
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	16
Tabel 3.4 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo 2020-2022	19
Tabel 3.5 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo 2020-2022	21
Tabel 2.1 Kebutuhan Data Penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo 2023	42
Tabel 2.2 Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka IPP di Indonesia	4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo	11
Gambar 2.2 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo	12
Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	13
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo, 2022	15
Gambar 2.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo, 2022.....	16
Gambar 2.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Umur.....	18
Gambar 2.7 Kerangka IPP Nasional	24
Gambar 2.8 Perbandingan IPP dan Nilai Indeks Domain Nasional Tahun 2021 dan 2022	26
Gambar 2.9 Perbandingan IPP dan Nilai Indeks Domain Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan 2022	27
Gambar 2.10 Capaian Nilai Masing – Masing Domain IPP Kabupaten Sukoharjo 2022	28
Gambar 3.1 Tahap Perhitungan Nilai IPP	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan (Usluhuddin 2022). Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding dengan penduduk lainnya (Rifano 2017).

Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari berbagai literatur dapat ditemukan banyak momentum sejarah yang digerakkan oleh pemuda seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa (Naviah 2020).

Pemuda merupakan masa dimana manusia sedang berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah: Pertama, Potensi Spiritual. Pemuda sejati, ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan

disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, Potensi Intelektual. Daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisan pemuda berbasis Intelektual. Ketiga, Potensi Emosional. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular kedalam jiwa bangsanya. Keempat, Potensi Fisikal. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan. Akan tetapi apabila hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi bangsa, karena bila jumlah yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan pengangguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2030 s/d 2040, Indonesia akan menikmati bonus demografi, dimana kondisi jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas

64 tahun). Pada periode 2030-2040, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

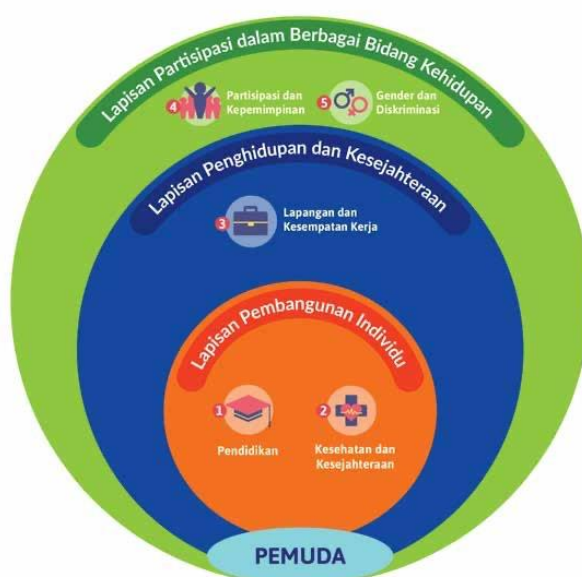
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai salah satu kabupaten satelit bagi Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo tergabung dalam daerah aglomerasi Solo Raya Bersama dengan Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 wilayah kecamatan, yang terbagi dalam 150 Desa dan 17 Kelurahan, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 908.227 jiwa. Jika ditinjau berdasarkan usia, proporsi pemuda yang ada di Kabupaten Sukoharjo yaitu 22% dari total keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, dalam hal ini batasan usia pemuda adalah penduduk usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.

Dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan yang menjadi bagian dari pembangunan, peran pemuda menjadi sangat penting. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, tetapi juga sebagai pengendali dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi Indonesia yang damai, negara yang menjadi tempat mereka tinggal, akan mereka warisi dan akan mereka pimpin. Untuk itu, upaya-upaya telah dan akan dilakukan untuk memastikan keterwakilan pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan.

Pada tahun 2022, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah merilis capaian nilai IPP Nasional yaitu sebesar 55,33. Nilai IPP Nasional ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan angka 53,33 dengan adanya kenaikan pada domain Kesehatan dan

Kesejahteraan serta domain Lapangan dan Kesempatan Kerja (Al Izzati, Murniati, and Kumala Dewi 2022).

Perumusan nilai Indeks Pembangunan Pemuda disusun dengan mengacu pada tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang (Bappenas 2021).



Gambar 1.1 Kerangka IPP di Indonesia

Sumber : Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019

Dengan adanya acuan perumusan nilai IPP ini, pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berinisiatif untuk menyusun dokumen Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sukoharjo 2023 sebagai upaya dalam mendukung pembangunan pemuda. Selain itu sebagai pemangku urusan dan fungsi dalam bidang kepemudaan melalui tugas utama layanan bidang kepemudaan, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sukoharjo dimana IPP menjadi salah satu poin penting dalam penilaian kinerja OPD.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari diselenggarakannya kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2023 ini adalah sebagai perwujudan akan kebutuhan Kabupaten Sukoharjo mengenai gambaran terhadap 5 domain penyusun Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai acuan pembangunan daerah ke depannya.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2023 ini adalah untuk menentukan nilai indeks IPP Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan yang tercakup dalam lima domain, diantaranya :

1. Domain pendidikan
2. Domain kesehatan dan kesejahteraan
3. Domain kesempatan dan lapangan kerja
4. Domain kepemimpinan dan partisipasi, dan
5. Domain gender dan diskriminasi

1.2.3 Sasaran

Adapun sasaran-sasaran penyusunan kegiatan ini mengacu pada 5 domain dan 15 indikator penyusun IPP, yaitu:

1. **Diketahuinya indikator pembangunan pemuda dari segi pendidikan**

- a. Rata-rata lama sekolah pemuda;
- b. APK sekolah menengah;
- c. APK perguruan tinggi.

2. Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

- a. Angka kesakitan pemuda;
- b. Persentase pemuda korban kejahatan;
- c. Persentase pemuda yang merokok;
- d. Persentase remaja perempuan yang sedang hamil.

3. Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

- a. Persentase pemuda wirausaha kerah putih;
- b. TPT pemuda.

4. Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

- a. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi;
- c. Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.

5. Diketuainya indikator pembangunan pemuda dari Domain Gender dan Diskriminasi

- a. Angka perkawinan usia anak;
- b. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas;
- c. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara spasial, ruang lingkup wilayah Penyusunan Dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo adalah wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dari Pekerjaan penyusunan IPP Kabupaten Sukoharjo adalah, sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi pada data (primer dan sekunder) pendukung kajian penyusunan IPP Kabupaten Sukoharjo
2. Melakukan analisis terhadap 5 domain dan 15 indikator indeks pembangunan pemuda serta melakukan perhitungan nilai indeks pada masing – masing domain
3. Melakukan perumusan nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2023 ini meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan pada tahap Laporan Pendahuluan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 – PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang pendahuluan dari buku laporan ini yang memuat latar belakang pelaksanaan pekerjaan, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan pekerjaan, lingkup kegiatan, serta sistematika pelaporan.

BAB 2 - PROFIL WILAYAH DAN PROFIL KEPEMUDAAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Bagian ini berisi mengenai profil secara umum wilayah Kabupaten Sukoharjo.

BAB 3 – METODOLOGI

Bagian ini berisi pemahaman terkait kepemudaan, tahapan dan metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB 4 – PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup laporan

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi kutipa/sitasi referensi yang digunakan

BAB 2

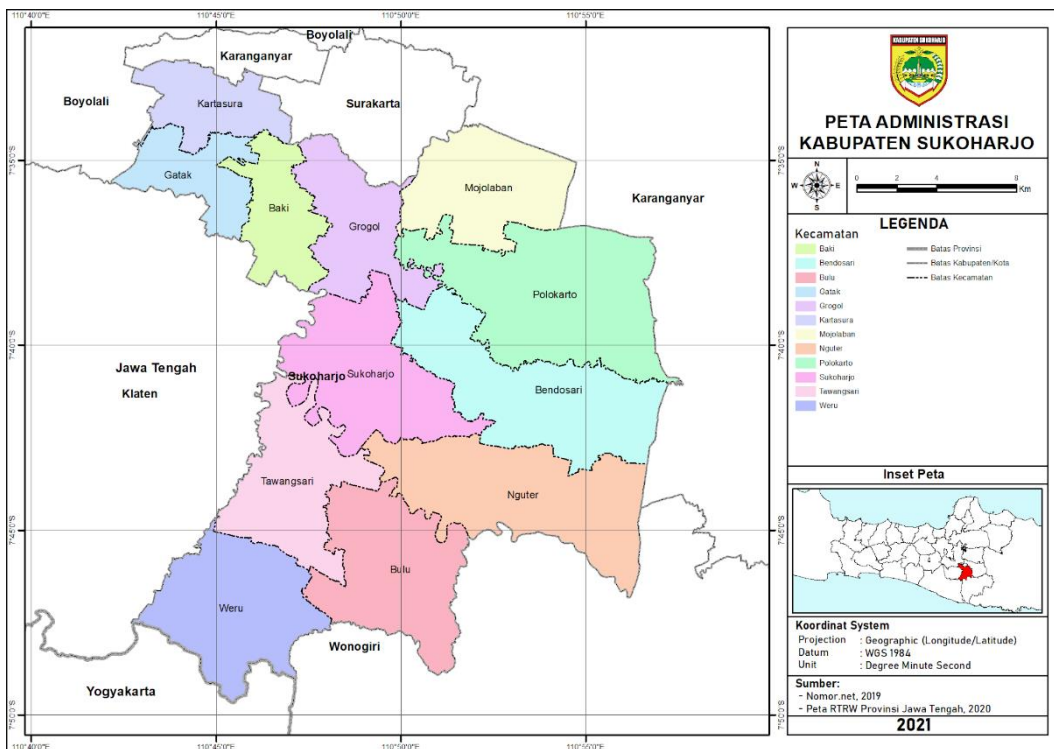
PROFIL WILAYAH DAN PROFIL KEPEMUDAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dimana memiliki peran sebagai kabupaten satelit dari Kota Surakarta. Kabupaten Sukoharjo terletak antara garis 7° 32' - 7° 49' Lintang Selatan dan garis 110° 42' - 110° 57' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 167 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 493,23 km² atau sekitar 1.43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan rincian luas masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

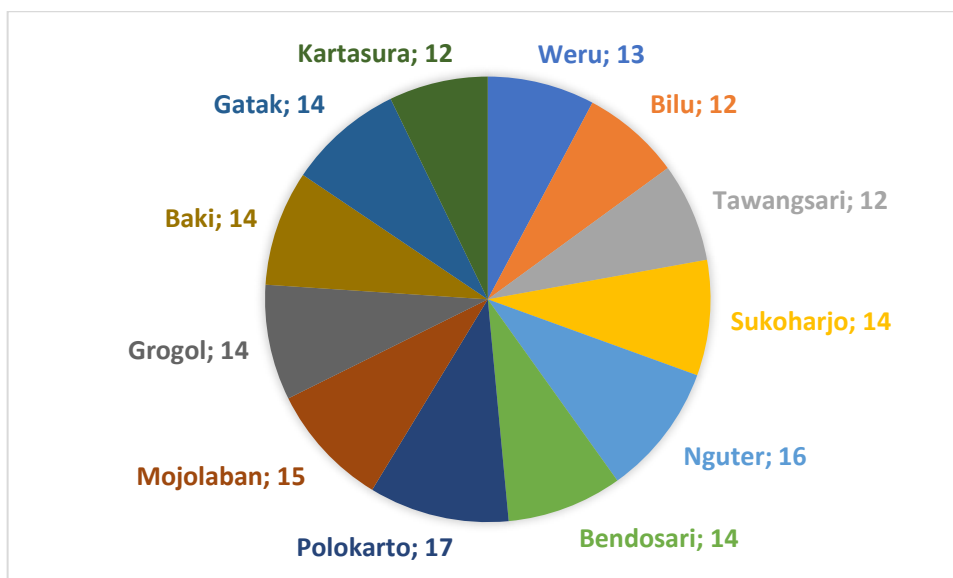
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
1.	Weru	45,6	13	9,25
2.	Bilu	46,4	12	9,41
3.	Tawang Sari	39,32	12	7,97
4.	Sukoharjo	46,82	14	9,49
5.	Nguter	57,85	16	11,73

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
6.	Bendosari	55,72	14	11,30
7.	Polokarto	66,89	17	13,56
8.	Mojolaban	38,29	15	7,76
9.	Grogol	31,33	14	6,35
10.	Baki	23,4	14	4,74
11.	Gatak	19,95	14	4,04
12.	Kartasura	21,66	12	4,39
	Jumlah	493,23	167	100

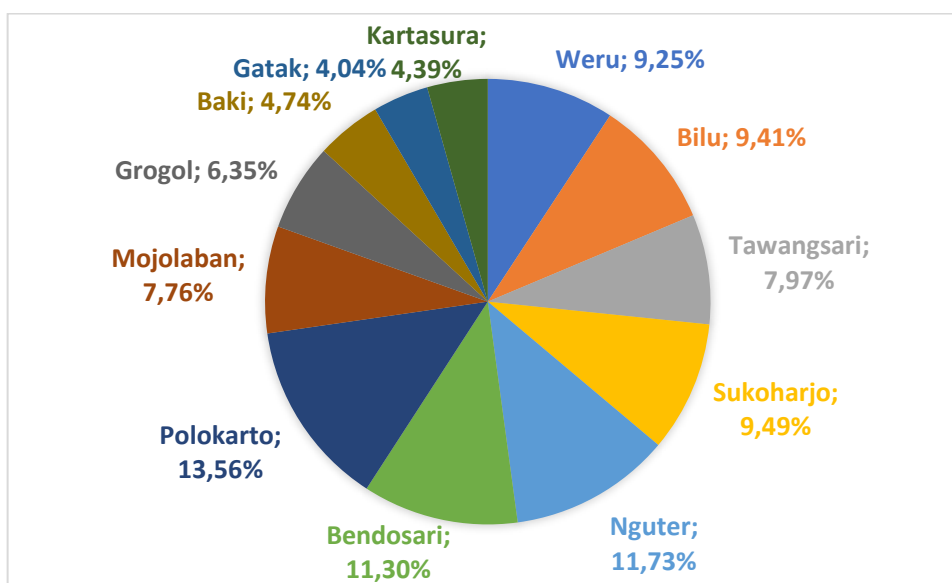
Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2023

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Polokarto dimana memiliki 17 kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Bilu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Kartasura dimana masing – masing memiliki 12 kelurahan.



Gambar 2.2 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo

Ditinjau berdasarkan luas wilayah masing – masing kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, wilayah kecamatan yang memiliki cakupan terluas adalah Kecamatan Polokarto dimana menempati 13,56% lahan dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Gatak yang hanya menempati 4,04% dari keseluruhan total luas wilayah kabupaten.



Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo 2023, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebanyak 916.627 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

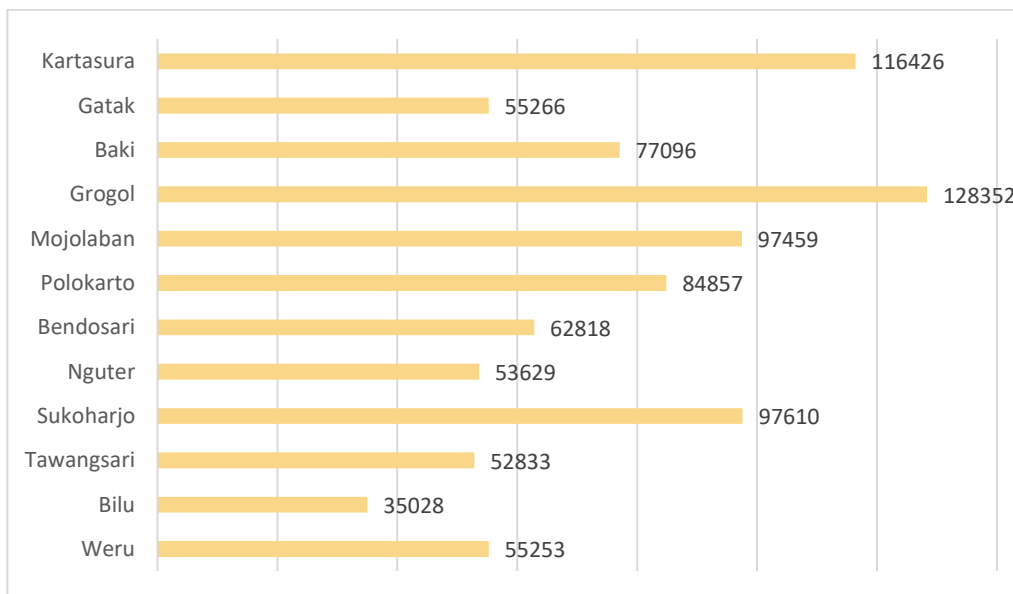
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
		2021	2022	2021	2022
1.	Weru	55.091	55.253	1312,32	1316,17
2.	Bilu	34.605	35.028	788,99	798,63
3.	Tawang Sari	52.750	52.833	1319,41	1321,49
4.	Sukoharjo	97.434	97.610	2185,60	2189,55
5.	Nguter	53.151	53.629	968,49	977,20
6.	Bendosari	62.263	62.818	1175,00	1185,47
7.	Polokarto	84.404	84.857	1354,41	1364,70
8.	Mojolaban	97.114	97.459	2734,53	2742,23
9.	Grogol	127.565	128.352	4254,17	4278,40
10.	Baki	76.852	77.096	3498,04	3509,15
11.	Gatak	54.853	55.266	2814,31	2838,52
12.	Kartasura	115.521	116.426	6004,33	6054,39
Jumlah		911.603	916.627	1953,46	1953,46

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2023

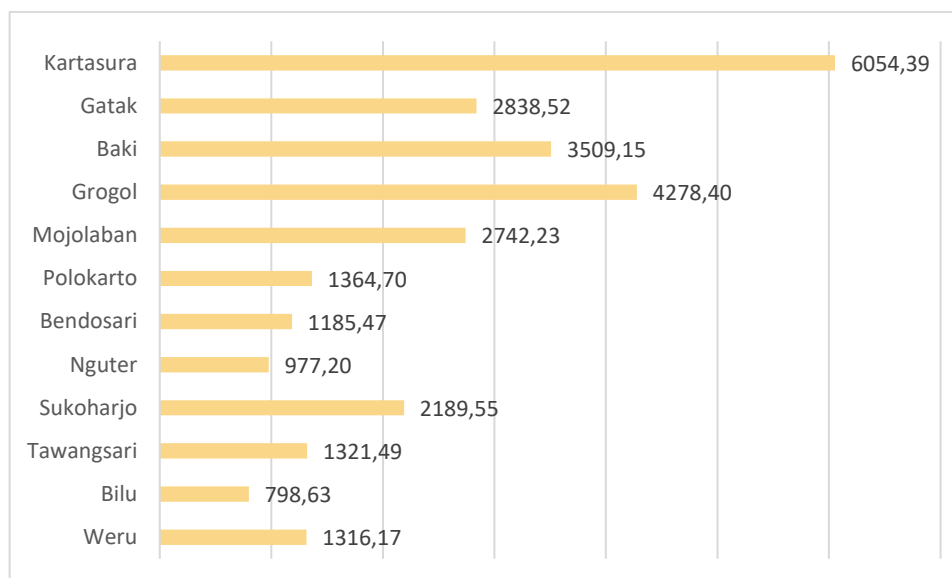
Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan

Grogol (128.352 jiwa / 14% dari total penduduk) dan Kecamatan Kartasura (116.426 jiwa / 13% dari total penduduk). Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bilu dengan jumlah 35.028 jiwa atau setara dengan 4% dari total jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo, 2022

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kecamatan, kecamatan Kertasura menjadi wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 6054,39 Jiwa/km². Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Sukoharjo adalah Kecamatan Bilu dengan angka kepadatan 798,63 Jiwa/km².



Gambar 2.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo, 2022

Aspek demografi di Kabupaten Sukoharjo juga ditinjau berdasarkan struktur usia dari penduduknya. Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Kabupaten Sukoharjo paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 458.483 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 458.144 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

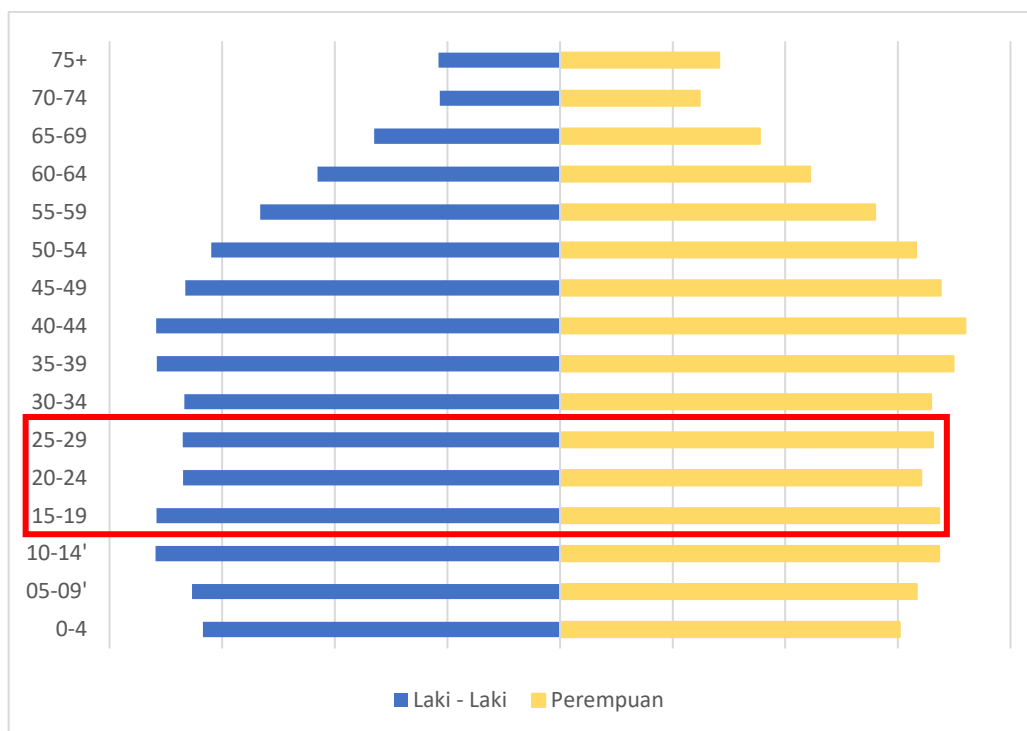
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	31.700	30.176	61.876
5-9	32.685	31.673	64.358
10-14	35.902	33.675	69.577
15-19	35.844	33.662	69.506
20-24	33.470	32.059	65.529

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
25-29	33.508	33.113	66.621
30-34	33.351	32.958	66.309
35-39	35.792	34.953	70.745
40-44	35.855	36.002	71.857
45-49	33.286	33.803	67.089
50-54	30.962	31.605	62.567
55-59	26.628	27.985	54.613
60-64	21.542	22.200	43.742
65-69	16.495	17.733	34.228
70-74	10.674	12.411	23.085
75+	10.789	14.136	24.925
Total	458.483	458.144	916.627

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2023

Jika mengacu pada data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo diatas, rentang usia pemuda adalah 15 – 29 tahun. Jumlah penduduk dengan kategori pemuda berdasarkan data di atas adalah sebesar 201.656 jiwa atau setara dengan 22% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 2.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Umur

2.1.3 Aspek Ekonomi

Keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah dapat dilihat pada beberapa indikator ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio jumlah penduduk miskin. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah salah satu tolok ukur guna melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu.

Perhitungan pada PDRB dilakukan berdasarkan atas dasar harga berlaku (harga pada tahun perhitungan) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) agar dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mendeskripsikan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan

untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dari suatu wilayah. Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022) mengalami peningkatan, dimana pada 2020 besaran PDRB ADHB adalah sebesar Rp. 36.890.533,42 dan meningkat menjadi Rp. 42.819.987,27 pada tahun 2022.

Hal yang sama juga terjadi pada PDRB ADHK dimana mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir (2020-2022) dari Rp. 26.616.503,11 pada 2020 menjadi Rp. 29.185.359,18 pada 2022. Kontribusi kenaikan terbesar disumbang oleh kategori sektor industri pengolahan sebesar 38,71% dan disusul oleh kategori sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,09%. Perkembangan PDRB ADHB per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo 2020-2022

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3229382,04	3371905,14	3552935,81
2	Pertambangan dan Penggalian	158787,96	163258,23	160783,39

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
3	Industri Pengolahan	14423665,44	15198038,15	16573922,65
4	Pengadaan listrik dan gas	39236,26	40765,5	42749,17
5	Pengadaan air	13792,1	14443,14	14931,03
6	Konstruksi	2475837,05	2674375,37	2896977,54
7	Perdagangan besar dan eceran	6274280,95	6736676,76	7319936,77
8	Transportasi dan Perdagangan	873822,21	933615,9	1650494,67
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	1307899,68	1398962,71	1673741,32
10	Informasi dan komunikasi	2224967,99	2440344,89	2498070,62
11	Jasa keuangan dan asuransi	1428105,79	1499530,08	1644604,18
12	Real estate	839264,58	865310,08	920600,72
13	Jasa perusahaan	161600,23	168808,19	185499,31
14	Administrasi pemerintahan	823369,44	809094,57	845948,56
15	Jasa pendidikan	1666043,85	1709298,37	1760604,64
16	Jasa kesehatan	423359,01	427891,37	438525,54

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
17	Jasa lainnya	527118,84	538139,74	639661,35
	Jumlah PDRB	36.890.533,42	38.990.458,19	42.819.987,27

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2023

Sedangkan apabila dilihat dari Nilai PDRB ADHK (2010), perkembangan dari tahun 2020-2022 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.5 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo 2020-2022

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2151040,47	2228051,92	2247807,62
2	Pertambangan dan Penggalian	91673,67	93103,78	88531,83
3	Industri Pengolahan	10141918,49	10408909,89	10870881,28
4	Pengadaan listrik dan gas	33956,84	35538,49	37103,53
5	Pengadaan air	10445,67	10826,94	11005,58
6	Konstruksi	1697172	1768732,27	1799861,96
7	Perdagangan besar dan eceran	4755069,46	5025998,71	5233435,1
8	Transportasi dan Perdagangan	693916,72	720519,83	1203185,28

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	972516,09	1021839,93	1172431,46
10	Informasi dan komunikasi	2113401,66	2317133,58	2365793,39
11	Jasa keuangan dan asuransi	943316,13	959112,02	978625,88
12	Real estate	687224,77	701094,62	732153,11
13	Jasa perusahaan	108902,37	112548,87	118046,88
14	Administrasi pemerintahan	548837,52	544430,36	556135,61
15	Jasa pendidikan	980891,29	995506,57	1019199,63
16	Jasa kesehatan	288321,24	288494,14	292042,61
17	Jasa lainnya	397898,72	402275,61	459118,43
	Jumlah PDRB	26.616.503,11	27.634.117,53	29.185.359,18

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2023

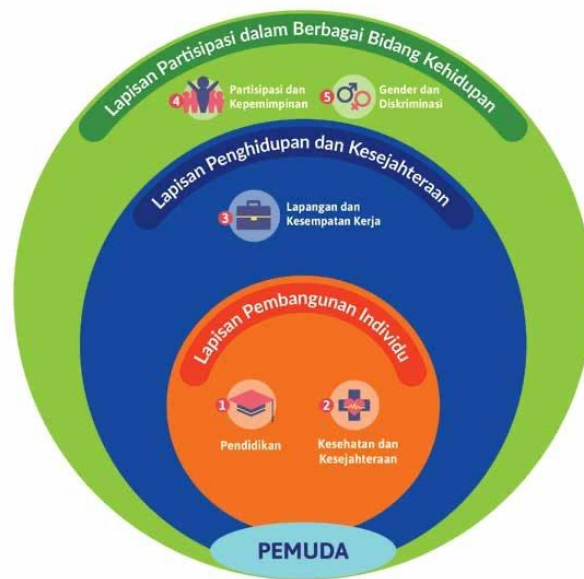
Hal yang sama juga terlihat pada hasil PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo dimana sektor yang memiliki tingkat kontribusi paling besar adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

2.2 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

2.2.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Mengaitkan usia tersebut dengan beberapa statistik di bidang pembangunan, kita memperoleh bahwa rentang usia tersebut terkait erat dengan masa pendidikan menengah hingga tinggi, masa berada pada angkatan kerja produktif, masa usia subur pada perempuan, dan masa transisi dari remaja ke dewasa. Agar setiap periode tersebut menunjukkan fase yang dapat mempertinggi kualitas hidup pemuda, maka diperlukan ukuran yang meliputi capaian di berbagai dimensi pembangunan.

IPP merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan domain, yaitu: (1) pembangunan individu; (2) pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dan diskriminasi sebagaimana terdapat pada Skema IPP Indonesia. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam rangka mengejawantahkan konsep pembangunan manusia seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya serta keluasan untuk meningkatkan kemampuannya.



Gambar 2.7 Kerangka IPP Nasional

1. Lapisan Pembangunan Individu

Lapisan ini merupakan perwujudan dari pemenuhan atas hak terhadap kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua domain kebutuhan dasar tersebut mempertinggi kapabilitas individu dalam memilih, melakukan aktivitas, dan menjadi lebih kreatif. Termasuk dalam domain kesehatan adalah dukungan ruang publik yang aman, yang dapat menjamin bahwa aktivitas individu untuk mencapai tujuannya dapat berjalan optimal tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

2. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

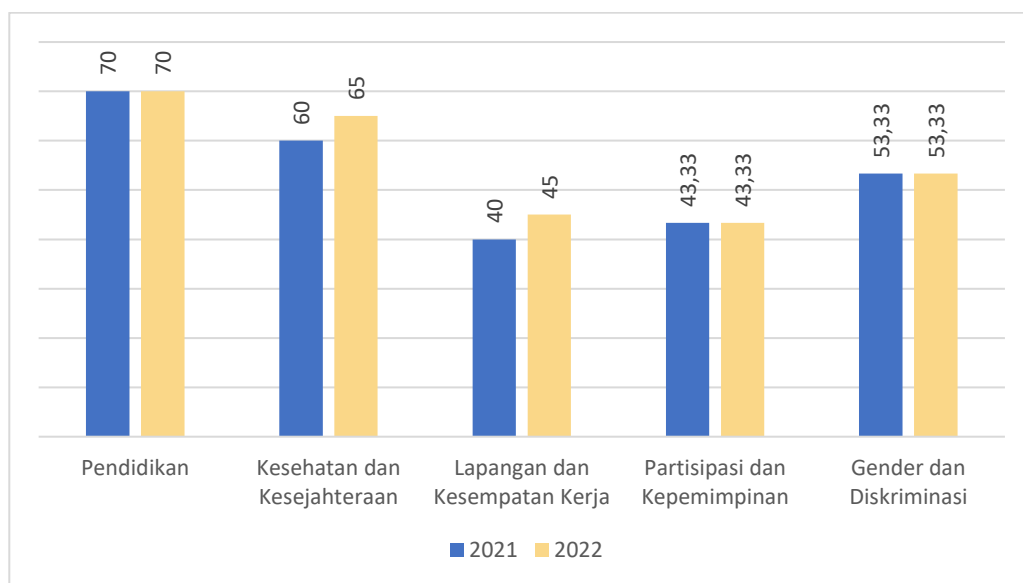
Perwujudan dari keberhasilan pembangunan individu adalah perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatnya akses terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Tersedianya lapangan kerja yang cukup dan diiringi

kemampuan pemuda untuk penetrasi ke pasar kerja menunjukkan tingginya daya saing pemuda di pasar kerja, se- bagaimana tercermin dari rendahnya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Demikian pula kemampuan pemuda untuk menjadi wirausaha kerah putih diasosiasikan dengan kemampuan dan kesinambungan da- lam berusaha mandiri sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik.

3. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mempertajam pembangunan yang adil dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang dapat mempertinggi nilai hidup individu itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan cukup tersedianya organisasi sebagai ruang diskusi, kerja sama serta mengaktualisasikan diri, termasuk di dalamnya adalah jaminan kebe- basan berpendapat. Selain itu, sebagai wujud pembangunan berkeadilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan jaminan ketiadaan diskriminasi gender mutlak diperlukan.

IPP disusun atas 5 domain pembangunan yang didalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Penghitungan IPP dalam dokumen ini dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan nilai indeks. Dalam indikator APK perguruan tinggi dan angka perkawinan usia anak. Metadata indikator TPB yang digunakan dalam analisa ini mengikuti definisi baru metadata TPB.

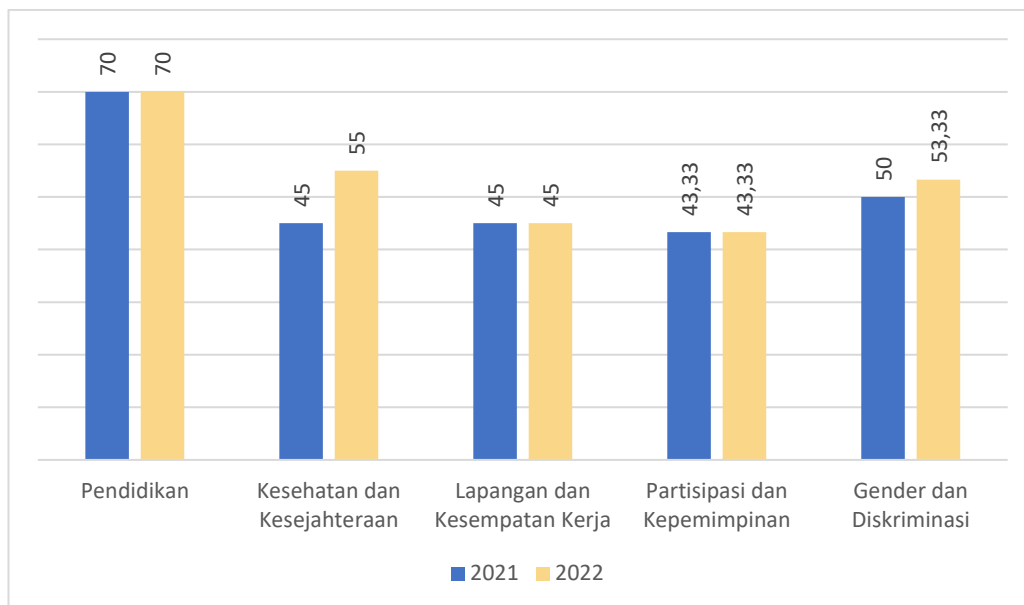
Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, nilai IPP Nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 55,33. Nilai IPP Nasional ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan angka 53,33 dengan adanya kenaikan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta domain Lapangan dan Kesempatan Kerja.



Gambar 2.8 Perbandingan IPP dan Nilai Indeks Domain Nasional Tahun 2021 dan 2022

2.2.2 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah

Apabila meninjau besaran nilai IPP di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, terjadi kenaikan angka IPP Jawa Tengah pada rentang 2021 – 2022. Pada Tahun 2021 nilai IPP Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 50,67 dan kemudian naik menjadi 53,33 pada 2022. Naiknya nilai IPP Provinsi Jawa Tengah ini dipicu oleh adanya kenaikan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta pada domain Gender dan Diskriminasi. Berikut merupakan gambaran perbandingan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah pada 2021 – 2022.



Gambar 2.9 Perbandingan IPP dan Nilai Indeks Domain Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan 2022

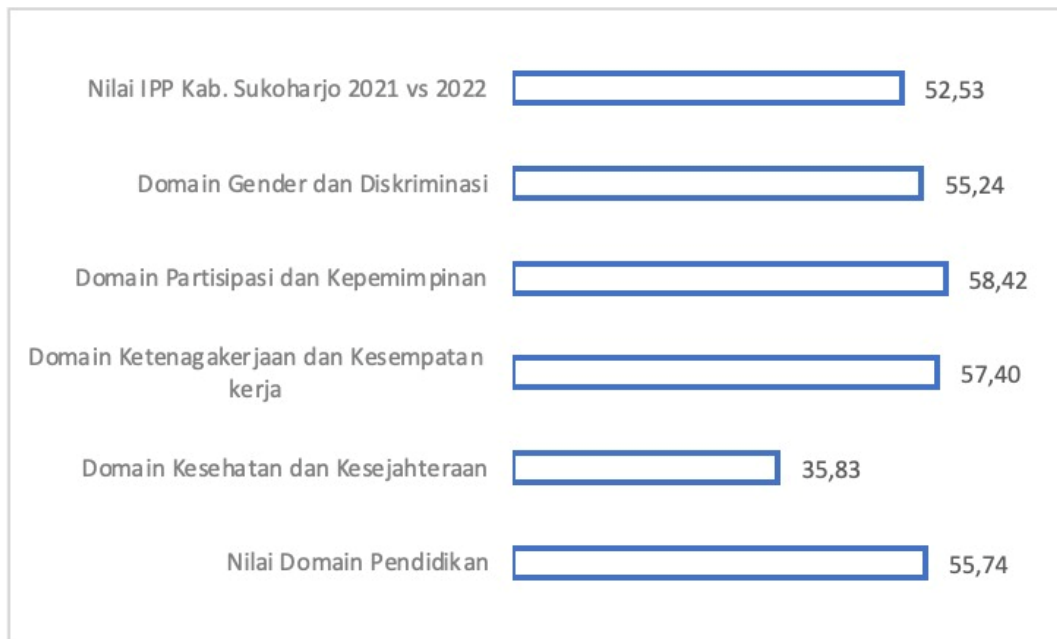
2.2.3 Isu Strategis Pemuda Kabupaten Sukoharjo

Pada Tahun 2022, Kabupaten Sukoharjo telah menyusun dokumen perhitungan nilai IPP dengan angka capaian **52,53**. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 43,91. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan perbaikan terhadap metode dan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap ketersediaan data pendukung. Hal ini merupakan konsekuensi positif dari pelaksanaan perhitungan IPP tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2022 dapat dilakukan perbaikan yang cukup merata.

Berdasarkan dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo tahun 2022, capaian masing – masing domain penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut.

1. Nilai domain dari Pendidikan adalah 55,74.
2. Nilai domain dari Kesehatan dan Kesejahteraan adalah 35,83.

3. Nilai domain dari Lapangan dan Kesempatan kerja adalah 57,40.
4. Nilai domain Partisipasi dan Kepemimpinan adalah 58,42
5. Nilai domain Gender dan Diskriminasi adalah 55,24.



Gambar 2.10 Capaian Nilai Masing – Masing Domain IPP Kabupaten Sukoharjo 2022

BAB 3

KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

3.1 KERANGKA TEORITIS

3.1.1 Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Terdapat beberapa definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figure yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia (Al Izzati, Murniati, and Kumala Dewi 2022).

Taufik Abdulah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural. Dalam hal ini, Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus websternya sebagai "*the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*".

Menurut WHO dalam Sarlito Sarwono (2008:9) usia 10-24 tahun digolongkan sebagai young people, sedangkan remaja

atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun. Menurut Mukhlis (2007:1) “pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Taufik Abdulah (1974:38) Ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagaisuatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup

bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsur pokok yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua, unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
3. Semangat pengabdianya
4. Sepontanitas dan dinamikanya
5. Inovasi dan kreativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada.

Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih

fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

3.1.2 Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Efendi 2020; Muryadi 2019). Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

1. Partisipasi dalam pemikiran
2. Partisipasi dalam pemikiran
3. Partisipasi Tenaga
4. Partisipasi dengan keahlian
5. Partisipasi dengan barang
6. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
7. Partisipasi dengan jasa
8. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

1. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.

2. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kretifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

3.1.3 Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa. Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya

komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut akan diuraikan beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

1. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah.

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpenggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat. Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.

2. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

3. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya

kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh, berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah

termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya lapangan kerja.
2. Penyalahgunaan Narkoba.
3. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
4. Pergaulan bebas.
5. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
6. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
7. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya.

3.2 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.2.1 Tahapan Persiapan

Kegiatan persiapan adalah kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun non-teknis yang akan melandasi rangkaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Lingkup kegiatan persiapan ini akan diselesaikan pada 1 (satu) bulan pertama pelaksanaan kegiatan penyusunan, terhitung sejak diterbitkannya SPMK. Dalam metode penyusunan pekerjaan ini, terdapat 4 (empat) aspek utama yang akan diuraikan: (1) metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini; (2) metode pengumpulan data yang menjelaskan proses memperoleh informasi data dan informasi yang diperlukan guna mendukung analisis; (3) proses analisis yang menjelaskan proses dan teknik analisis data; dan (4) rencana kerja guna mendukung tersusunnya dokumen Perhitungan IPP Kabupaten Sukoharjo 2023.

Lingkup kegiatan persiapan ini berupa:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir antara tim penyusun dan tim teknis

Tujuan : Koordinasi dengan tim teknis
: Menyetujui rencana dan metodologi penyusunan
: Mengumpulkan data dan informasi awal terkait IPP Kabupaten Sukoharjo
Metode : Diskusi dan koordinasi

Langkah : Diskusi kesiapan tim dalam menjalankan lingkup pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan

: Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan

Output : Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati

: Data dan informasi terkait IPP Kabupaten Sukoharjo

2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir antara tim penyusun dan tim teknis

Tujuan : Menyiapkan desain survey yang diperlukan untuk keperluan penyusunan

: Menyusun format – format untuk kebutuhan baik di lapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait dengan kondisi kawasan

Metode : Diskusi dan koordinasi

Langkah : Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada

- : Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan
- : Penyiapan desain survei
- Output : Data sekunder
- : Format desain survei

3. Penyiapan Referensi IPP Kabupaten Sukoharjo

- Tujuan : Menyiapkan data atau kompilasi referensi IPP Kabupaten Sukoharjo
- Metode : Diskusi dan koordinasi
- Langkah : Koordinasi dengan pihak terkait
- : Penyamaan persepsi dan kesempatan terkait atau kompilasi referensi penyusunan dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo
- Output : Gambaran IPP Kabupaten Sukoharjo

3.2.2 Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini berkaitan dengan melakukan pendataan terkait masing – masing domain penyusun IPP, baik data primer maupun data sekunder.

- Tujuan : Mengumpulkan data
- Metode : Kunjungan instansional
- : Kompilasi data

Langkah : Permohonan secara formal pengambilan Data instansional

Output : Data primer dan sekunder

Berikut ini ditampilkan tabel kebutuhan data yang diperlukan dalam menunjang Penyusunan IPP Kabupaten Sukoharjo 2023.

Tabel 3.1 Kebutuhan Data Penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo 2023

Variabel		Parameter Data	Sumber Data
Domain Pendidikan			
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
X2	APK sekolah menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
X3	APK perguruan tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan			
X4	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo

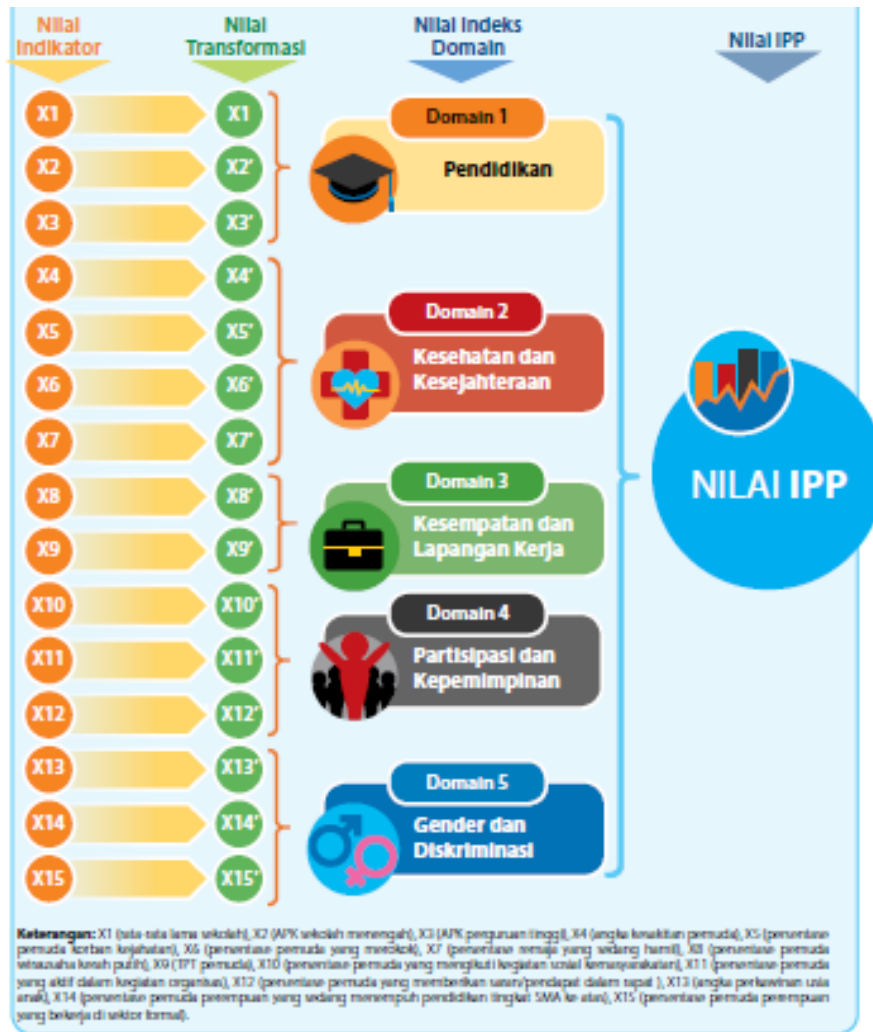
Variabel		Parameter Data	Sumber Data
		hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
X6	Persentase pemuda yang merokok****	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil*	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun**	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja			
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan,	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo

Variabel		Parameter Data	Sumber Data
		pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.	
X9	TPT Pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16–30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo;
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan ***			
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo • Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindikcapil Kabupaten Sukoharjo

Variabel		Parameter Data	Sumber Data
		saran/ pendapat dalam rapat tersebut	
Domain Gender dan Diskriminasi			
X13	Angka perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	<ul style="list-style-type: none"> • BPS Kabupaten Sukoharjo; • Dindukcapil Kabupaten Sukoharjo

3.2.3 Tahapan Perhitungan Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya diinventarisasi dan dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Kegiatan berikutnya setelah inventarisasi data adalah pengolahan data, yaitu pekerjaan menyusun dan merangkai berbagai jenis data yang satuan dan fungsinya belum teratur menjadi suatu susunan data yang sistematis dan terinci sesuai dengan fungsi, klasifikasi dan kegunaannya, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan analisis lebih lanjut.



Gambar 3.1 Tahap Perhitungan Nilai IPP

Sumber: Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019

Penghitungan nilai indeks pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai setiap indikator berdasarkan nilai batas maksimal dan minimal yang ditetapkan. Dalam menentukan nilai batas maksimal/minimal ini, digunakan standar resmi batas maksimal dan minimal pada beberapa indikator, seperti indikator rata – rata lama sekolah yang ditargetkan oleh PBB yang mencapai angka 15 tahun (bersekolah hingga lulus SMA/Sederajat). Sementara itu, untuk indikator yang tidak memiliki standar, penentuan nilai batas maksimal/minimal dilakukan dengan menggunakan

nilai maksimal/minimal data empiris (sebaran data setiap provinsi) yang ditambahkan dengan dua kali nilai standar deviasi. Tabel berikut ini menampilkan nilai batas maksimal dan minimal untuk setiap indikator penyusun IPP.

Tabel 3.2 Batas Maksimum dan Minimum Indikator IPP

Variabel		Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
Domain pendidikan				
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
X2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
X3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan				
X4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X6	Persentase pemuda yang merokok****	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil*	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Lapangan dan Kesempatan kerja				
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Variabel		Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
X9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda arab Saudi
Domain Partisipasi dan kepemimpinan***				
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Gender dan Diskriminasi				
X13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25	100 (target)	Standar
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Sumber: Dokumen IPP Kementerian Bappenas, 2019

Nilai maksimal (atau minimal) ini adalah sasaran yang harus dicapai agar nilai IPP mendekati angka ideal, yaitu 100. Untuk indikator yang capaiannya dianggap makin baik ketika nilainya makin tinggi, nilai maksimal adalah nilai sasaran yang harus dicapai agar dihasilkan angka IPP yang tinggi. Sebaliknya, untuk indikator yang capaiannya dianggap makin baik ketika nilainya makin rendah, nilai minimum adalah nilai sasaran yang harus dicapai.

Dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum, nilai indikator penyusun IPP dinormalkan dan distandarkan untuk menghasilkan nilai skor indikator, nilai indeks domain, dan nilai IPP.

3.2.4 Tahapan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap ini merupakan kesimpulan dari kesimpulan penilaian dari ke 5 domain dan 15 indikator yang merangkai IPP Kabupaten Sukoharjo. Pada tahap kesimpulan dan rekomendasi, setiap domain maupun indikator akan diuraikan lebih lanjut secara objektif terkait dengan aspek-aspek yang masih belum memenuhi atau bahkan aspek-aspek yang sudah terpenuhi dengan baik. Dari kesimpulan dan rekomendasi tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dapat memproyeksikan program-program yang mampu mendukung skor dari masing-masing domain yang dinilai.

BAB 4**ANALISIS INDEKS****PEMBANGUNAN PEMUDA****4.1 KEPEMUDAAN**

Pemuda secara luas dapat diartikan sebagai kelompok usia demografi. Dalam berbagai pengertian kelompok demografi ini oleh beberapa lembaga dan organisasi didefinisikan secara berbeda. Terdapat berbagai macam definisi pemuda di tingkat global yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperjelas definisi pemuda. Berikut merupakan beberapa definisi kelompok umur pemuda.

Tabel 4.1 Batasan Usia Pemuda menurut Beberapa Organisasi

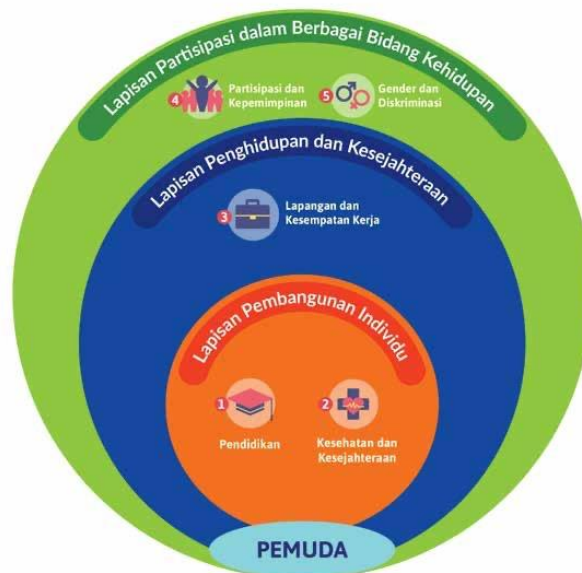
Organisasi	Batasan Usia Pemuda
United Nations (Adolescent: 10-19; Youth: 15-24; Young People: 10-24)*]	10–24
The Commonwealth	15–29
European Union (EU)	15–29
UN Habitat (Youth Fund)	15–32
World Bank (WB)	15–34
African Union (AU)	15–35
Indonesia	16-30

Sumber: Buku Laporan potensi kepemudaan, Dispora Kab. Sukoharjo, 2021

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang

memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Mengaitkan usia tersebut dengan beberapa statistik di bidang pembangunan, kita memperoleh bahwa rentang usia tersebut terkait erat dengan masa pendidikan menengah hingga tinggi, masa berada pada angkatan kerja produktif, masa usia subur pada perempuan, dan masa transisi dari remaja ke dewasa. Agar setiap periode tersebut menunjukkan fase yang dapat mempertinggi kualitas hidup pemuda, maka diperlukan ukuran yang meliputi capaian di berbagai dimensi pembangunan.

IPP merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan domain, yaitu: (1) pembangunan individu; (2) pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dan diskriminasi sebagaimana terdapat pada Skema IPP Indonesia berikut.



Gambar 4.1 Lapisan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda Nasional

Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam rangka mengejawantahkan konsep pembangunan manusia seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk

memperluas pilihan-pilihannya serta keluasan untuk meningkatkan kemampuannya.

1. Lapisan Pembangunan Individu

Lapisan ini merupakan perwujudan dari pemenuhan atas hak terhadap kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua domain kebutuhan dasar tersebut mempertinggi kapabilitas individu dalam memilih, melakukan aktivitas, dan menjadi lebih kreatif. Termasuk dalam domain kesehatan adalah dukungan ruang publik yang aman, yang dapat menjamin bahwa aktivitas individu untuk mencapai tujuannya dapat berjalan optimal tanpa gangguan dari lingkungan sekitar.

2. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Perwujudan dari keberhasilan pembangunan individu adalah perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatnya akses terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Tersedianya lapangan kerja yang cukup dan diiringi kemampuan pemuda untuk penetrasi ke pasar kerja menunjukkan tingginya daya saing pemuda di pasar kerja, sebagaimana tercermin dari rendahnya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Demikian pula kemampuan pemuda untuk menjadi wirausaha kerah putih diasosiasikan dengan kemampuan dan kesinambungan dalam berusaha mandiri sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik.

3. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mempertajam pembangunan yang adil dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang dapat mempertinggi nilai hidup individu itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan cukup

tersedianya organisasi sebagai ruang diskusi, kerja sama serta mengaktualisasikan diri, termasuk di dalamnya adalah jaminan kebebasan berpendapat. Selain itu, sebagai wujud pembangunan berkeadilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan jaminan ketiadaan diskriminasi gender mutlak diperlukan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kepemudaan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 66/2017 tentang "Koordinasi Strategis Lintas-sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan". Kepustakaan pembangunan juga menyediakan banyak pandangan mengenai pembangunan pemuda. Community Network for Youth Development (2001), misalnya, menyebut bahwa pembangunan pemuda ialah "proses di mana semua pemuda mencari cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial dasar mereka dan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan di masa remaja dan dewasa muda". Sementara itu, Pitmann (1993, seperti dikutip Butt and Mehmood, 2010) mendefinisikannya secara lebih spesifik, yaitu "proses perkembangan yang terus berlanjut di mana semua pemuda terlibat untuk (1) memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan sosial mereka agar aman, merasa diperhatikan, dihargai, berguna dan berpijak pada spiritual, dan (2) membangun keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan mereka berfungsi dan berkontribusi dalam kehidupan mereka sehari-hari. The Commonwealth (2013) mendefinisikan pembangunan pemuda sebagai usaha "meningkatkan status pemuda, memberdayakan mereka untuk membangun kompetensi dan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan. Hal ini akan memungkinkan pemuda untuk berkontribusi dan mendapatkan keuntungan dari situasi politik yang stabil, situasi ekonomi yang layak, dan situasi hukum yang

mendukung, yang memungkinkan pemuda dapat berpartisipasi penuh sebagai warga negara yang aktif dinegaranya masing-masing”. Definisi-definisi itu memperlihatkan bahwa pembangunan pemuda mencakup berbagai domain atau dimensi yang perlu ditangani secara memadai oleh kebijakan sector atau kementerian yang relevan di negara.

Berbagai kebijakan publik dan program-program turunannya sangat berperan dalam mencapai tujuan pembangunan pemuda yang diinginkan. Semua kebijakan itu memberi arahan kepada para pemangku kepentingan tentang peran masing-masing dan ikut menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, data pembangunan, memainkan peran kunci sebagai sumber daya informasi bagi pengambilan keputusan kebijakan.

4.2 DOMAIN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah hak tiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dituangkan dalam tujuan keempat dari Sustainable Development Goals (SDGs) “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua” dimana kualitas sumber daya manusia akan meningkat apabila mendapatkan pendidikan yang berkualitas pula.

4.2.1 Rata – rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berikut merupakan angka rata – rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo.

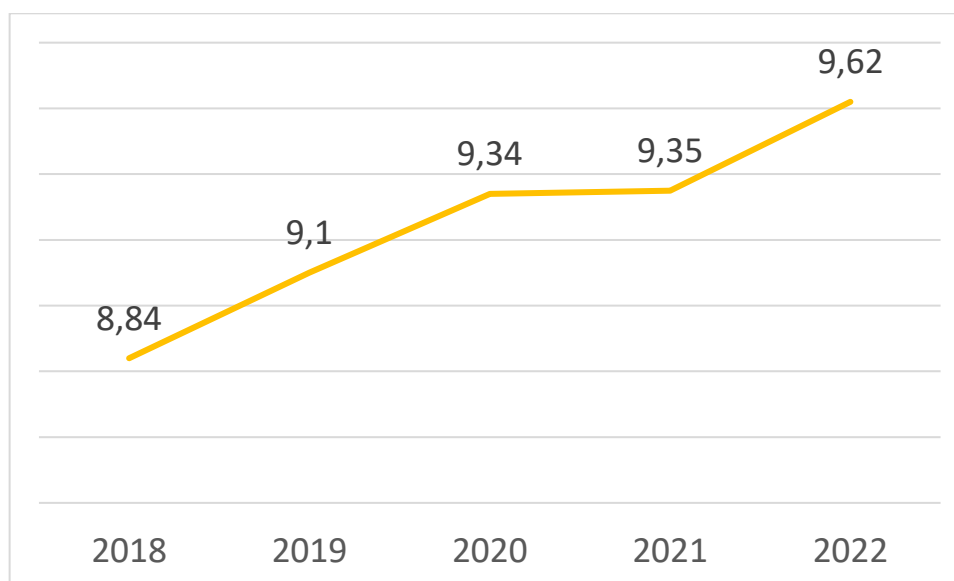
Tabel 4.2 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo

	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sukoharjo	8,84	9,10	9,34	9,35	9,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2023

Ditinjau berdasarkan tabel angka rata – rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018 – 2022) rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dari 2018 hingga 2022 adalah sebesar 9%. Peningkatan angka rata – rata lama sekolah ini dipicu oleh beberapa macam indikator diantaranya adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya pendidikan dasar, adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat, dan adanya bantuan dari pemerintah akan kemudahan masyarakat khususnya masyarakat yang kekurangan untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Berikut merupakan visualisasi grafik

peningkatan angka rata – rata lama sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 4.2 Capaian Angka Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo

4.2.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SM). Selain itu, tingkat partisipasi sekolah pemuda juga dipengaruhi oleh tipe daerah. Dimana pada daerah perdesaan tingkat partisipasi sekolah para pemuda lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi sekolah di daerah perkotaan. Berikut merupakan rincian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo.

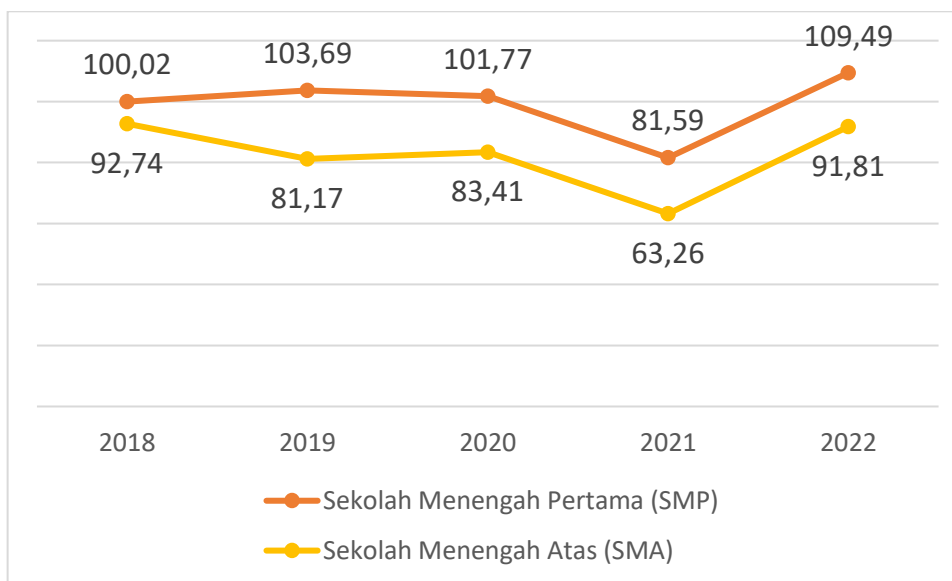
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100.02	103.69	101.77	81,59	109,49
Sekolah Menengah Atas (SMA)	92.74	81.17	83.41	63,26	91,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2023

Dalam metode perhitungan nilai IPP, dalam domain pendidikan yang menjadi indikator adalah pada Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah yaitu persentase siswa di tingkat SMP dan SMA dalam kelompok usia 13-18 tahun. Ditinjau berdasarkan rincian data APK sekolah menengah Kabupaten Sukoharjo di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi pada angka capaian APK sekolah menengah. Namun jika dilihat secara perubahan angka hingga 2022, angka capaian APK sekolah menengah Kabupaten Sukoharjo cenderung mengalami kenaikan. Pada APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) terjadi kenaikan sebesar 9% dalam kurun 5 tahun terakhir. Sedangkan apabila meninjau capaian APK Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan, terjadi penurunan namun tidak signifikan. Penurunan capaian APK SMA di Kabupaten Sukoharjo dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar -1%. Walaupun angka penurunan capaian APK SMA di Kabupaten Sukoharjo tidak seberapa tinggi namun hal ini patut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya oleh Dinas Pendidikan agar mampu untuk mendorong peningkatan angka APK SMA di wilayahnya. Berikut merupakan visualisasi capaian APK

sekolah menengah di Kabupaten Sukpharjo dalam kurun 2018 hingga 2022.



Gambar 4.3 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Kabupaten Sukoharjo

Selain menganalisis mengenai capaian APK pada jajaran sekolah menengah, dalam hal perhitungan IPP diperlukan juga analisis mengenai capaian APK pada perguruan tinggi yang ada di suatu wilayah. Berkaitan dengan capaian APK Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya saat ini belum terdapat pembaharuan data. Data terakhir yang dapat dihimpun adalah data tren APK Perguruan tinggi sejak 2011 hingga 2014. Berikut merupakan rincian data APK Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo pada 2011 hingga 2014.

Tabel 4.4 APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukoharjo					
	2011	2012	2013	2014	2021	2022
Perguruan Tinggi (PT)	23,80	28,48	26,07	33,83	32,43	39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2023

Rata-rata kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) di Kabupaten Sukoharjo, jika dilihat dari tren data dari tahun 2011 hingga 2014, adalah sekitar 2,50% setiap tahunnya. Namun, terdapat penurunan APK PT yang tidak biasa antara tahun 2012 dan 2013. Jika diperkirakan hingga tahun 2022, asumsi kenaikan APK tersebut mencapai sekitar 39%. Dapat digaris bawahi bahwa angka 39% ini hanyalah perkiraan berdasarkan asumsi kenaikan positif dengan metode perhitungan aritmatik.

4.2.3 Skor Sub Indeks dan Nilai Indeks Domain Pendidikan

Skor sub Indeks dan Nilai Indeks Domain Pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo didapatkan berdasarkan perhitungan keseluruhan indikator yang ada dalam domain pendidikan seperti RLS, APK sekolah menengah dan APK Perguruan tinggi.

Berikut merupakan data hasil perhitungan nilai domain pendidikan dalam Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

Tabel 4.5 Skor dan Nilai Sub Indeks Domain Pendidikan

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Pendidikan								
1	Rata-rata lama sekolah	0	15	9,62	6,41	(0,60)	6,41	
2	APK sekolah menengah	0	100	81,59	8,16	0,18	8,16	
3	APK perguruan tinggi	0	100	39	3,90	0,61	3,90	
Nilai Domain 1								61,57

Sumber: Data Diolah, 2023

Batas tertinggi yang diharapkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut parameter IPP adalah 15, sementara Kabupaten Sukoharjo mencapai angka 9,62. Persentase nilai

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berturut-turut adalah 81,59% dan 39% dari target maksimum yang adalah 100%. Maka dari itu diperoleh nilai domain pendidikan sebesar 61,57. Jika ditinjau berdasarkan angka capaian domain pendidikan pada perhitungan IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 yang memperoleh nilai 55,74, terjadi tren kenaikan sebesar 5,83%.

Kenaikan nilai dalam domain pendidikan dalam pembangunan pemuda dapat menandakan adanya peningkatan akses, kualitas, dan partisipasi pemuda dalam sistem pendidikan. Hal ini bisa mencerminkan upaya yang sukses dalam meningkatkan jumlah pemuda yang mendapatkan akses pendidikan, baik pada tingkat menengah maupun tinggi. Selain itu, kenaikan nilai ini bisa menggambarkan peningkatan mutu dan kesetaraan dalam proses pendidikan, serta adanya investasi yang lebih besar dalam mendukung keberhasilan pemuda di bidang pendidikan.

Peningkatan nilai dalam domain pendidikan menunjukkan kesuksesan dalam upaya memberikan akses yang lebih luas kepada pemuda terhadap pendidikan berkualitas. Ini termasuk dalam hal meningkatkan angka partisipasi dalam pendidikan formal maupun non-formal, meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan, serta memperbaiki standar pembelajaran. Kenaikan nilai ini juga bisa mengindikasikan adanya perbaikan dalam ketersediaan dan aksesibilitas bagi pemuda terhadap program-program pelatihan, pendidikan vokasional, atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, peningkatan nilai dalam domain pendidikan pada pembangunan pemuda dapat menjadi indikator positif atas upaya nyata dalam meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan bagi pemuda. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan mereka, memungkinkan pemuda untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam masyarakat serta mengejar potensi penuh mereka untuk masa depan yang lebih baik.

4.3 DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aspek kesehatan penduduk bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Guna mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, namun juga dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis antara berbagai sektor. Salah satu cara untuk mencapai visi pembangunan kesehatan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Kesehatan merupakan modal yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan proses pembangunan bangsa. Terdapat dua komponen penting dalam kesehatan yaitu kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Kedua komponen penting dari kesehatan ini perlu diperhatikan sejak dini. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan mengisi jiwa

generasi muda dengan nilai-nilai agama dan pendidikan moral. Sementara untuk menjaga kesehatan raga dengan cara memberi asupan nutrisi yang baik agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang kuat dan sehat.

Peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional sangat diperlukan, terutama pemuda sebagai elemen intelektual yang memiliki peran strategis sebagai penerus pembangunan bangsa Indonesia. Para pemuda hendaknya selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan pemuda dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan terampil. Peran yang dapat dilakukan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah dengan turut berpartisipasi dan ikut berpola hidup sehat.

4.3.1 Angka Kesakitan

Kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh yang menurun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun kegiatan lainnya. Hal ini juga akan menyebabkan menurunnya produktivitas kerja dan pada akhirnya akan mengganggu kinerja secara keseluruhan. Angka kesakitan pemuda merupakan proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan / aktivitas sehari-hari.

Sesuai dengan fungsinya, informasi tersebut dikelola oleh bagian P2PM yang menangani penyakit menular yang berasal dari manusia serta penyakit menular yang disebarkan oleh hewan atau zoonosis. Informasi mengenai kejadian penyakit menular direpresentasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Angka Kesakitan Penduduk Kab. Sukoharjo, 2022 (Penyakit menular)

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Demam Berdarah DBD	35	317	185	222	637
2	Chikungunya	0	31	558	556	75
3	Malaria	2	3	2	8	17
4	Leptospirosis	17	10	14	4	24
5	Avian Flu / Flu Burung	0	0	0	0	0
6	Antraks	0	0	0	0	0
7	Filaria	0	0	6	0	1
8	Tuberculosis	604	744	611	708	1.260
9	Diare	17.196	16.848	13.902	8.614	12.807
10	Pneumonia Balita	991	1.315	572	877	862
11	Kusta	17	20	12	12	21
12	HIV kasus baru	17	47	56	34	55
13	AIDS Kasus Baru	45	27	31	26	27
14	IMS Inf.Men. Seksual	91	105	60	31	152
15	GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies)	18	34	14	15	28

Sumber: Buku Profil Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2022

Selain mengacu pada data diatas, BPS Provinsi Jawa Tengah juga telah merilis data angka kesakitan menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah. Menimbang terbatasnya pengukuran yang dilakukan secara spesifik terhadap rentang usia 16-30 tahun, maka dalam hal ini mengacu pada angka yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Angka yang dimaksud adalah angka kesakitan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 adalah 10,65%,

berikutnya berturut turut menurun menjadi 9,14% pada tahun 2020 dan menjadi 9,46% pada tahun 2021. Sehingga dalam hal ini digunakan pendekatan generalisasi yaitu angka kesakitan 9,46%.

4.3.2 Persentase Pemuda Korban Kejahatan

Pemuda yang menjadi korban kejahatan seringkali menghadapi risiko serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Data mengenai persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan bisa memberikan gambaran tentang tingkat risiko, jenis kejahatan yang dominan, serta efektivitas upaya perlindungan dan penegakan hukum di suatu wilayah.

Kondisi ini bisa menjadi acuan bagi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi pemuda. Data tentang persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan dapat membantu mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap tindak kejahatan, jenis kejahatan yang dominan, dan kelompok pemuda yang lebih rentan menjadi korban. Dari sana, dapat dirancang strategi yang lebih efektif untuk pencegahan kejahatan, pendidikan kesadaran hukum, dan peningkatan dukungan bagi korban kejahatan pemuda.

Selain itu, hal ini juga dapat mencerminkan kualitas intervensi sosial, pola pemantauan kejahatan, serta peran pemuda dalam mendorong lingkungan yang lebih aman. Penurunan persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan bisa menjadi indikasi keberhasilan kebijakan, peningkatan kesadaran, serta efektivitas intervensi sosial dan hukum yang bertujuan untuk melindungi pemuda dari risiko kejahatan.

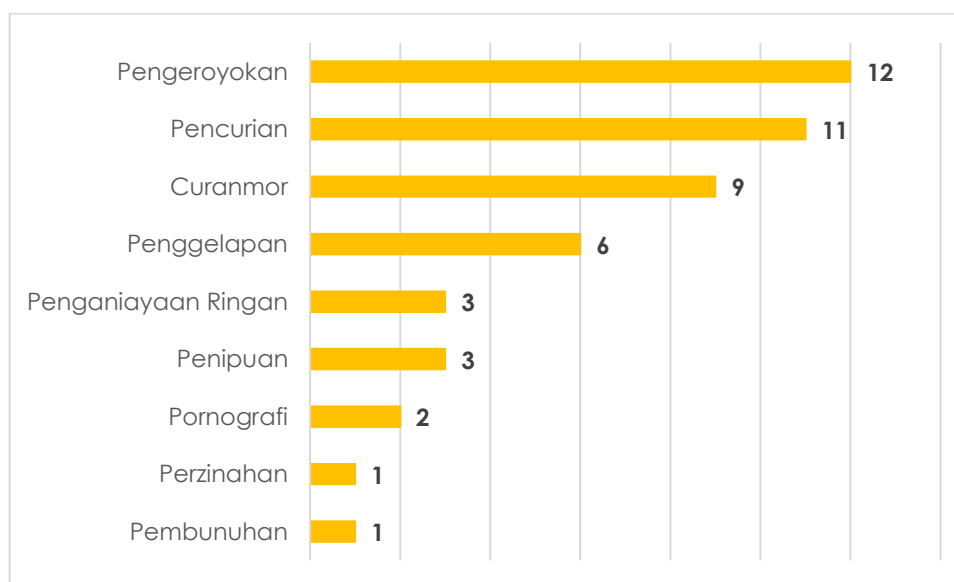
Berikut merupakan rincian kejadian kriminalitas yang terjadi pada remaja di Kabupaten Sukoharjo pada 2022.

Tabel 4.7 Banyaknya Kasus Kriminalitas menurut Jenisnya Tahun 2022 pada Pemuda di Kabupaten Sukoharjo

Jenis Kejahatan	Jumlah
Pembunuhan	1
Perzinahan	1
Pornografi	2
Penipuan	3
Penganiayaan Ringan	3
Penggelapan	6
Curanmor	9
Pencurian	11
Pengeroyokan	12
Total	48

Sumber: Kepolisian Resor Sukoharjo, 2023

Ditinjau berdasarkan data diatas, didapatkan data angka kejahatan yang terjadi pada pemuda di Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 48 kasus.



Gambar 4.4 Jumlah Kejadian Kriminalitas pada Pemuda di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan perhitungan nilai indikator, dari 48 kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indikator

persentase pemuda korban kejahatan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 0,024%. Angka ini didapatkan dari perhitungan jumlah kasus dibagi dengan jumlah pemuda yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Perlu digaris bawahi bahwa nilai tersebut merupakan nilai indikatif, dibutuhkan pendataan yang lebih terperinci selama kurun waktu 1 tahun penuh agar dapat dipetakan berapa jumlah riil usia pemuda yang mengalami tindak kejahatan.

4.3.3 Persentase Pemuda Merokok

Merokok, aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa. Terdapat 2 (dua) cara merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua hanya menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung.

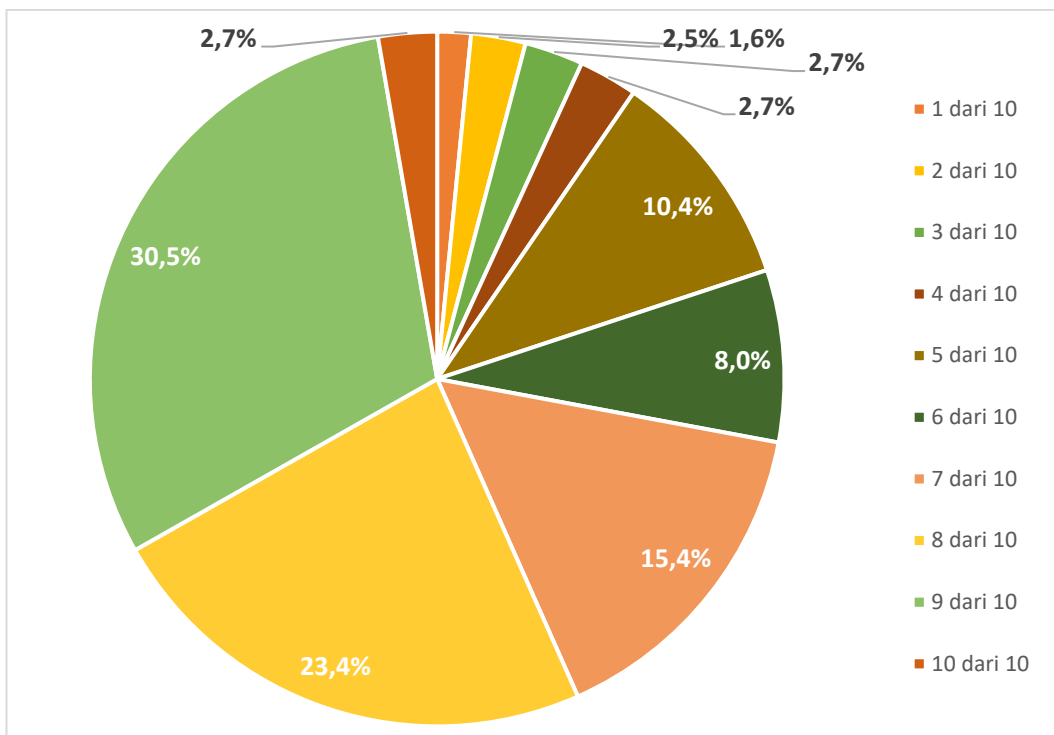
Perokok terdiri dari berbagai kalangan usia, baik tua maupun muda, termasuk usia anak sekolah. Banyak anak yang belum cukup umur sudah mencoba dan terbiasa untuk mengkonsumsi rokok. Hal ini diakibatkan oleh dorongan lingkungan sekitar mereka yang menjadi perokok aktif sehingga menimbulkan rasa ingin mencoba untuk merokok.

Tabel 4.8 Persentase Pemuda Merokok di Kabupaten Sukoharjo, 2021

	15-24			25-34			35-44			45-54			55-64			65+		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kabupaten Sukoharjo	11	13,83	10,37	25,88	24,47	21,27	28,08	25,19	26,77	23,21	21,57	24,34	18,79	20,47	17,87	15,95	13,57	13,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Menimbang bahwa usia pemuda yang diprasyarkan dalam perhitungan IPP adalah usia antara 16-30 tahun, maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap ketersediaan data yang ada. Apabila dihitung secara kasar, maka jumlah total pemuda yang merokok dalam rentang usia 15-34 tahun adalah sebanyak 31,64%. Jika ditinjau dari jumlah populasi usia 15-34 tahun maka terdapat 20 kelompok usia populasi, sehingga apabila direrata maka masing-masing populasi mewakili 1,5%, maka apabila rasionalisasi hanya pada rentang usia 16-30 tahun diperoleh angka persentase indikatif sebesar 31,84%.



Gambar 4.5 Persentase Remaja Merokok di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Hasil Kuesioner 2023

Selain berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, dalam hal perolehan data pemuda merokok yang ada di Kabupaten Sukoharjo juga dilakukan survey pendapat pada pemuda di Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil survey pendapat tersebut diperoleh data bahwa pada dasarnya kebiasaan merokok remaja di Kabupaten Sukoharjo cukup tinggi yaitu sekitar 8 sampai dengan 9 remaja per 10 remaja.

4.3.4 Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil

Indikator Persentase remaja perempuan yang sedang hamil menjadi sebuah indikator penting dalam pemetaan kondisi kesehatan dan kesejahteraan remaja perempuan dalam pembangunan pemuda. Data ini mencerminkan kondisi kesehatan reproduksi, akses terhadap layanan kesehatan seksual, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran

mengenai kesehatan reproduksi di kalangan remaja perempuan.

Tingginya persentase remaja perempuan yang sedang hamil bisa mencerminkan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan seksual yang memadai, pernikahan usia muda, serta rendahnya pemahaman akan konsekuensi kesehatan dan sosial dari kehamilan pada usia yang masih tergolong muda.

Dalam perspektif pembangunan pemuda, penurunan angka remaja perempuan yang hamil bisa menjadi indikasi peningkatan kesejahteraan remaja perempuan. Langkah-langkah untuk mengurangi angka remaja perempuan yang hamil dapat mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan seksual yang komprehensif, promosi kesadaran kesehatan reproduksi, pemberdayaan remaja perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan mereka, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terpercaya.

Berdasarkan data yang dihimpun saat ini, perkiraan indikatif jumlah remaja Perempuan yang sedang hamil dan tercatat berdasarkan data yaitu 494 jiwa. Sehingga kisaran persentase remaja Perempuan yang sedang hamil saat ini adalah 0,5%. Angka ini didapatkan berdasarkan perhitungan dari jumlah populasi remaja Perempuan ditahun 2023 sebanyak 98.834 jiwa.

Dapat dilihat bahwa dalam kurun 3 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup drastis pada indikator remaja Perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sukoharjo. Penurunan angka ini merupakan sebuah perubahan positif

bagi Kabupaten Sukharjo dimana hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya edukasi seks sejak dini.

Penurunan angka remaja perempuan yang hamil bisa mengindikasikan adanya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seksual yang berkualitas, peningkatan pemahaman remaja perempuan akan dampak dari kehamilan usia muda, serta upaya pencegahan dari berbagai pihak terkait.

Dalam perspektif pembangunan pemuda, penurunan angka remaja perempuan yang hamil menunjukkan adanya perubahan positif dalam tata nilai, kesadaran, dan pemberdayaan remaja perempuan. Hal ini menandakan adanya upaya pencegahan lebih lanjut, edukasi yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi, dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan tubuh dan kesehatan mereka.

Penurunan angka ini juga mengindikasikan adanya kesuksesan kebijakan dan program-program pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta lembaga pendidikan dalam menyediakan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang tepat untuk remaja perempuan. Dengan berkurangnya remaja perempuan yang hamil, masyarakat dapat melihat adanya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi remaja perempuan, serta peningkatan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan meraih potensi penuh mereka.

4.3.5 Skor Sub Indeks dan Nilai Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Setelah dilakukan perhitungan terhadap indikator Penyusun domain kesehatan dan kesejahteraan pada IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, didapatkan besaran nilai domain sebagai berikut.

Tabel 4.9 Skor dan Nilai Sub Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan								
1	Angka kesakitan pemuda	0	20	9,46		0,53	0,53	
2	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,024		0,99	0,99	
3	Persentase pemuda yang merokok	0	36	31,84		0,12	0,12	
4	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	0,5		0,99	0,99	
Nilai Domain 2								6,56

Sumber: Data Diolah, 2023

Apabila ditinjau berdasarkan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo pada perhitungan IPP tahun 2022, terjadi peningkatan kualitas dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dimana dalam domain kesehatan dan kesejahteraan ini diperlukan penurunan angka capaian untuk dapat memperoleh kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang baik pada pemuda di Kabupaten Sukoharjo.

4.4 DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah diungkapkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan. Informasi tentang ketenagakerjaan sangat diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Salah satu faktor pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan adanya pembangunan kepemudaan. Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan termasuk di dalamnya adalah memasuki usia kerja. Pemuda memiliki potensi besar dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Beberapa kebijakan perlu dikeluarkan untuk tenaga kerja pemuda, di antaranya pemberian pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja pemuda pada sektor-sektor penting yang sesuai dengan kondisi pemuda.

4.4.1 Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Berdasarkan data DISDANGKOP-UKM, saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukoharjo terus tumbuh. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Sukoharjo melihat pertumbuhan signifikan dan mulai bangkit setelah pandemi virus Corona mereda. Kebangkitan pelaku UMKM melegakan Pemkab Sukoharjo karena mampu menjadi penyangga ekonomi.

Pelaku UMKM sekarang tidak hanya berasal dari orang tua saja tapi muncul banyak anak muda juga membuka usaha. Angka sekarang 110.000 pelaku UMKM dan kami perkirakan hingga akhir tahun 2022 terus tumbuh bisa mencapai 120 ribuan pelaku UMKM.

Apabila didasarkan data dan informasi di atas, maka pada prinsipnya pemenuhan terhadap indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih Kabupaten Sukoharjo hanya perlu memenuhi angka sebanyak 4.033 wirausaha kerah putih atau sebanyak 2% dari jumlah total pemuda yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, dari keterangan paragraf sebelumnya diperkirakan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi standar maksimum yang dipersyaratkan.

4.4.2 TPT Pemuda

Salah satu permasalahan dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah tentang tingkat pengangguran dimana sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama dari kemiskinan, dapat mendorong peningkatan

keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pengangguran yang terjadi pada pemuda merupakan pukulan bagi perekonomian daerah. Pemuda yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam pembangunan perekonomian tetapi pada kenyataannya justru menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Pengangguran terbuka (open unemployment) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari:

1. Mereka yang mencari pekerjaan.
2. Mereka yang mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan masih mencari pekerjaan lain.

Data yang digunakan dalam penyusunan dokumen IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini adalah mengacu pada data yang dikeluarkan baik dari BPS Kabupaten Sukoharjo maupun dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan apa yang telah diukur oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, didapatkan data mengenai TPT Pemuda di Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 3,32. Dalam hal ini dilakukan upaya generalisasi pada angka TPT mengingat ketidaktersediaan data spesifik mengenai data TPT Pemuda.

4.4.3 Skor Sub Indeks dan Nilai Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Seperti pada penentuan nilai domain pendidikan dan domain kesehatan sebelumnya, penentuan nilai domain lapangan dan kesempatan kerja ini didasarkan pada hasil perhitungan indikator Penyusun domain yaitu persentase pemuda kerah putih dan juga TPT pemuda di Kabupaten Sukoharjo.

Berikut merupakan rincian hasil perhitungan nilai Indikator domain lapangan dan kesempatan kerja.

Tabel 4.10 Skor dan Nilai Sub Indeks Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja								
1	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	2	10,00	-	10,00	
2	TPT pemuda	0	28	3,32		0,57	0,57	
Nilai Domain 3								54,41

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada indikator Penyusun domain lapangan dan kesempatan kerja ini diperoleh nilai pada indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih sebesar 2 poin dan pada indikator TPT sebesar 12 poin. Apabila ditinjau berdasarkan capaian nilai domain pada tahun 2022, terjadi penurunan pada indikator TPT pemuda dimana capaian pada perhitungan IPP Tahun 2022 didapatkan nilai sebesar 6,93 sedangkan pada tahun eksisting diperoleh nilai sebesar 3,32. Terjadinya penurunan nilai pada TPT pemuda ini

menyebabkan naiknya nilai domain lapangan dan kesempatan kerja di Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,61 poin

4.5 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dalam pembangunan pemuda merujuk pada upaya untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial, politik, dan masyarakat, serta mengembangkan kepemimpinan mereka. Domain ini melibatkan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, dan memperoleh keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikut ini beberapa aspek penting dalam Domain Partisipasi dan Kepemimpinan:

1. Partisipasi Politik Pembangunan pemuda mencakup keterlibatan pemuda dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, debat politik, dan diskusi kebijakan publik. Pemuda harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, menjadi anggota partai politik, atau bahkan terlibat dalam pembentukan kebijakan publik.
2. Keterlibatan Masyarakat Pemuda perlu didorong dan didukung untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat yang bermanfaat, seperti kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, dan proyek lingkungan. Ini membantu pemuda mengembangkan kesadaran sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.
3. Organisasi Pemuda
Organisasi pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan pemuda. Mereka memberikan platform bagi pemuda untuk berorganisasi, berinteraksi dengan

sesama pemuda, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui kegiatan seperti pelatihan, program pengembangan diri, dan proyek kolaboratif.

4. Pemimpin Pemuda

Pembangunan pemuda juga melibatkan pengembangan generasi pemimpin muda yang kompeten dan bertanggung jawab. Ini melibatkan memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemuda untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai konteks, dan mendapatkan mentorship dari pemimpin yang lebih berpengalaman.

5. Advokasi dan Partisipasi Global

Pemuda dapat berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan gerakan sosial baik di tingkat lokal maupun global. Ini mencakup dukungan untuk pemuda dalam berpartisipasi dalam forum internasional, seperti konferensi, dialog global, dan organisasi pemuda internasional, sehingga mereka dapat memperluas wawasan mereka dan mempengaruhi isu-isu global.

Melalui partisipasi aktif dan pengembangan kepemimpinan pemuda, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

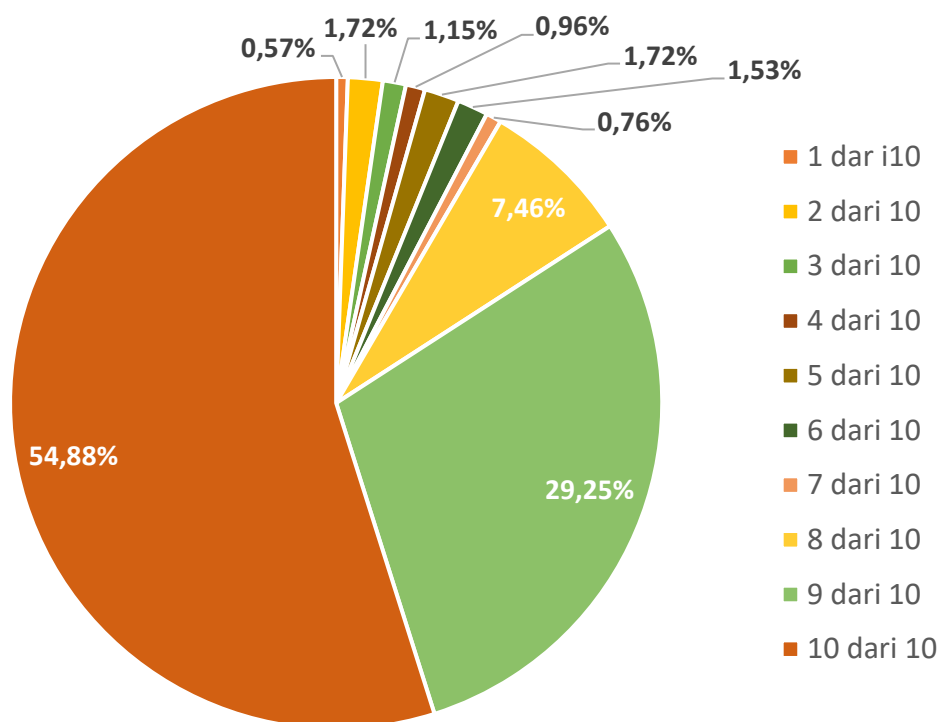
4.5.1 Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Dalam lingkup Partisipasi dan Kepemimpinan, fokus diberikan pada pemahaman tiga segi utama. Pertama, persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir.

Kedua, persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang terlibat dalam kegiatan organisasi yang memiliki struktur keanggotaan, kepengurusan, dan peraturan khusus selain dari tempat kerja atau sekolah dalam tiga bulan terakhir. Ketiga, persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang aktif dalam pertemuan atau rapat di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan kontribusi ide atau pendapat di dalamnya.

Pengembangan pemuda dalam kerangka pembangunan memiliki tiga dimensi penting: perkembangan individual, peningkatan kualitas kehidupan, dan partisipasi yang aktif dalam berbagai bidang. Evaluasi pembangunan pemuda terfokus pada tingkat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan masyarakat merupakan salah satu elemen dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang meliputi: keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, partisipasi dalam organisasi, dan aktif berkontribusi dalam rapat atau pertemuan masyarakat.

Untuk menilai persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, dilakukan survei untuk memahami pola keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi.



Gambar 4.6 Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Dari metode skala di atas, dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berada di angka di atas 7 dari 10 pemuda. Apabila dikalkulasi, jawaban responden yang memilih angka di atas 7 dari 10 pemuda mencapai 92,35%. Sehingga dapat diasumsikan tingkat keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo mencapai 90% dari total populasi penduduk usia pemuda.

4.5.2 Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi

Salah satu indikator yang berpengaruh dalam domain partisipasi dan kepemimpinan adalah jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dimana hal ini menggambarkan tingkat partisipasi pemuda di Kota Semarang dalam kegiatan

kemasyarakatan. Berikut merupakan data gambaran jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Sukoharjo.

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	50	60	66	42	46

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo, 2023

Ditinjau dari gambaran tabel di atas, persentase organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan yang cukup drastis pada kurun 2019 hingga 2020 dimana terjadi pengurangan persentase organisasi kepemudaan sebesar 24 poin. Hal ini merupakan imbas dari terjadinya wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia sehingga menghentikan aktivitas masyarakat tidak terkecuali kegiatan pada sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo. Namun pada tahun 2021 geliat organisasi kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo sudah mulai kembali dimana hal ini dibuktikan dengan naiknya persentase organisasi kepemudaan yang aktif.

Selain informasi dasar tentang organisasi kepemudaan, penting juga untuk memperhatikan keterlibatan aktif pemuda dalam struktur kegiatan seperti karang taruna. Berikut merupakan data eksisting karang taruna yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	KLASIFIKASI		
			TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU
1	Weru	13	8	5	0
2	Tawang Sari	12	7	5	0
3	Bulu	12	5	7	0
4	Nguter	16	10	5	1

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	KLASIFIKASI		
			TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU
5	Sukoharjo	14	7	5	2
6	Bendosari	14	9	5	0
7	Polokarto	17	10	5	2
8	Mojolaban	15	11	4	0
9	Grogol	13	10	2	1
10	Baki	15	10	5	0
11	Gatak	14	12	2	0
12	Kartasura	12	5	5	2
JUMLAH		167	104	55	8

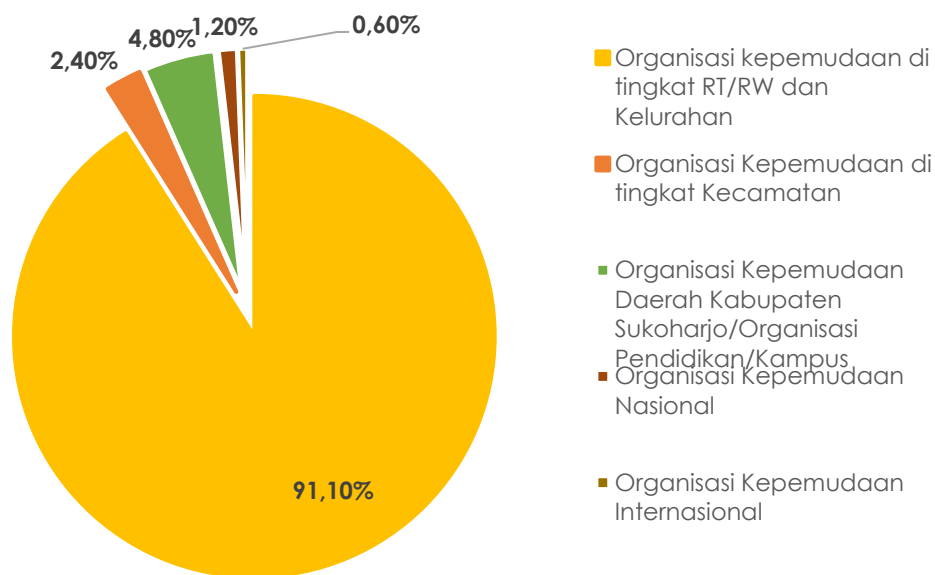
Sumber: Dinsos Kabupaten Sukoharjo, 2023

Peraturan Menteri Sosial Nomor: 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dari 12 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, terdapat 167 Karang Taruna Aktif yang tersebar di 167 keluarahan. Dari total keseluruhan karang taruna yang ada di Kabupaten Sukoharjo, 62% karang taruna memiliki klasifikasi “tumbuh” dimana hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemangku kepentingan seperti Dinas yang mengampu karang taruna, organisasi pembina dan stake holder lainnya untuk bahu membahu mengembangkan karang taruna dan partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan.

Selain itu, juga dilakukan survey pada pemuda di Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan partisipasi dalam

organisasi kepemudaan yang nantinya data survey ini berperan sebagai data pendukung. Berikut merupakan hasil survey pendapat mengenai partisipasi pemuda dalam organisasi di Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 4.7 Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi

Ditinjau berdasarkan data hasil survey pendapat di atas, didapatkan angka 91,10% responden yang merupakan pemuda di Kabupaten Sukoharjo turut aktif dalam kegiatan organisasi baik pada tingkat kelurahan hingga tingkat internasional.

Meskipun angka hasil survey yang telah dilakukan menunjukkan angka 91,10% namun angka batas maksimum yang dipersyaratkan dalam perhitungan IPP hanyalah 45% sehingga capaian Kabupaten Sukoharjo sudah melewati standar tertinggi.

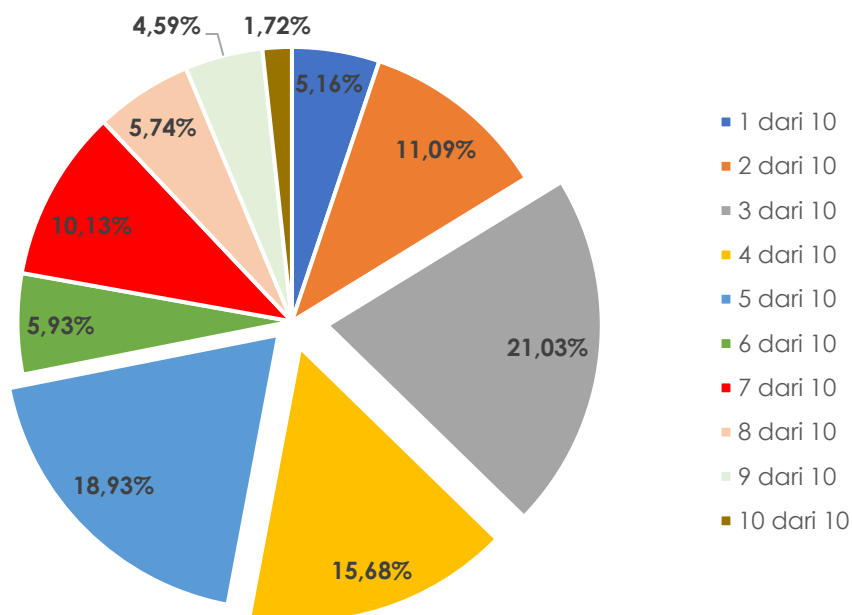
4.5.3 Persentase Pemuda yang Memberikan Saran / Pendapat dalam Rapat

Persentase pemuda yang berkontribusi dengan saran atau pendapat dalam rapat mengacu pada persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah menghadiri pertemuan atau rapat dalam lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan aktif memberikan saran atau pendapat dalam kesempatan tersebut. Data semacam ini tergolong dalam kategori informasi yang jarang tersedia di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan, terutama di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Untuk mengumpulkan persentase pemuda yang terlibat dalam memberikan saran atau pendapat dalam rapat, dilakukan penelitian dengan melakukan kuesioner kepada kelompok pemuda yang ada, termasuk anggota Karang Taruna. Proses survei dilakukan dengan pertanyaan tertutup serta pengambilan sampel terarah, fokus pada masing-masing ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Karang Taruna di tingkat desa atau kelurahan. Setiap ketua OKP dan Karang Taruna diberi pertanyaan tentang tingkat partisipasi OKP dalam rapat, diskusi, dan dialog pembangunan, baik di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

Melalui pembatasan ini pada populasi dan pengambilan sampel yang terarah, diharapkan hasil dari survei tersebut dapat menjadi representasi yang akurat dari populasi pemuda di setiap kecamatan dengan menggunakan metode Klaster (area sampling) dalam kuesioner. Dari segi keterlibatan pemuda dalam kegiatan

sosial dan masyarakat, survei menunjukkan bahwa pemuda memiliki inisiatif yang cukup signifikan dalam mengadakan kegiatan tersebut.



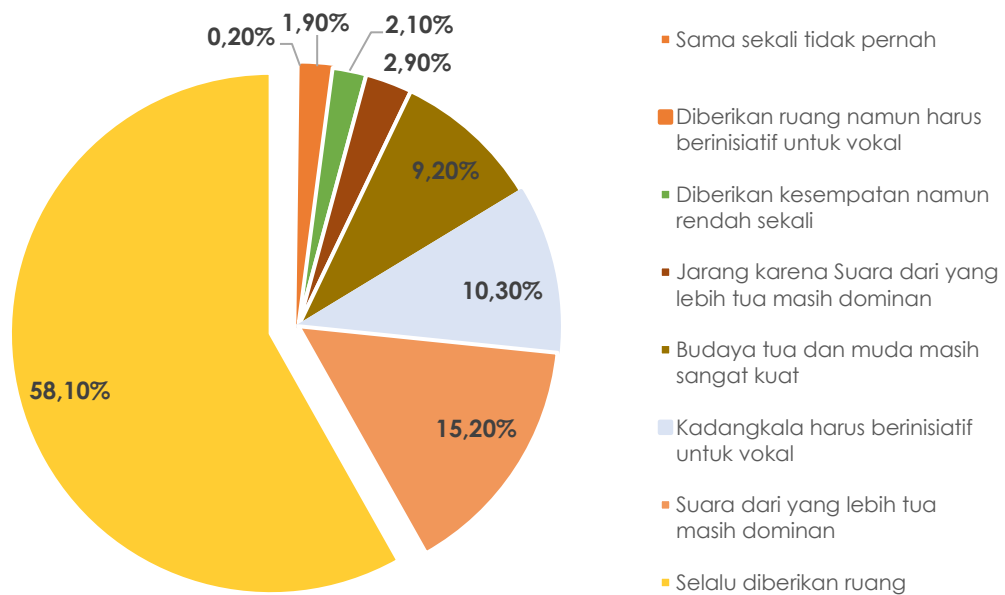
Gambar 4.8 Jumlah pemuda yang memberikan saran/pendapat

Sumber: Survey jajak pendapat kepada OKP oleh penyusun, 2023

Secara total persentase, pemuda yang berkontribusi dengan saran atau pendapat dalam rapat di Kabupaten Sukoharjo berkisar antara 30 hingga 50% dari setiap kelompok 10 pemuda. Oleh karena itu, dalam konteks keterlibatan aktif pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam pertemuan pembangunan, didapat asumsi nilai persentase rerata sekitar 45% pemuda yang secara aktif terlibat dalam kegiatan musyawarah pembangunan atau memberikan saran dan pendapat dalam rapat.

Dari asumsi tersebut maka diperoleh nilai $45\% \times (\text{Nilai dari } 70\% \text{ pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari seluruh populasi usia pemuda}) = 45\% \times 201.656 \text{ jiwa} = 90.745 \text{ jiwa}$.

Selain itu, untuk menunjang indikator persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat dilakukanlah survey pada topik ketersediaan ruang berpendapat dalam forum bagi pemuda di Kabupaten Sukoharjo. Berikut merupakan hasil survey pendapat yang telah berhasil dihimpun.



Gambar 4.9 Ketersediaan Ruang Berpendapat bagi Pemuda

Ditinjau berdasarkan hasil survey pendapat di atas, didapatkan hasil bahwa 58,10% responden merasa selalu diberikan ruang bebas untuk mengutarakan pendapatnya dalam forum atau rapat. Sama seperti yang terjadi pada persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dimana terdapat batas persyaratan persentase pada indikator pemuda yang memebrikan saran / pendapat dalam rapat yaitu sebesar 25% sehingga capaian Kabupaten Sukoharjo sudah melewati standar tertinggi.

Ruang untuk mengutarakan pendapat yang inklusif dan terbuka sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif

dalam proses pembangunan. Ruang seperti forum publik, pertemuan, diskusi, atau kelompok kerja sama dapat menjadi wadah yang memberikan kesempatan kepada individu untuk berbagi ide, pandangan, dan masukan. Menyediakan platform yang memungkinkan lebih dari 50% pemuda untuk mengutarakan pendapat mereka adalah langkah penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan.

4.5.4 Skor Sub Indeks dan Nilai Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Untuk mendapatkan besaran nilai pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Kabupaten Sukoharjo, maka diperlukan perhitungan pada tiap indikator pengungkit dari domain ini. Berikut merupakan hasil dari perhitungan indikator yang ada dalam domain partisipasi dan kepemimpinan.

Tabel 4.11 Skor dan Nilai Sub Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan								
1	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	92,35	9,60	0,04	9,60	
2	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	45	10,00	-	10,00	
3	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	25	10,00	-	10,00	
Nilai Domain 4								97,45

Sumber: Data Diolah, 2023

Di wilayah Kabupaten Sukoharjo sendiri, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan salah satu domain yang memiliki kontribusi paling tinggi dalam perolehan skor IPP Kabupaten. Apabila ditinjau berdasarkan perbandingan perolehan nilai domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda pada IPP Kabupaten Sukoharjo 2022, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana pada IPP 2022 angka capaian domain keempat ini adalah sebesar 58,42. Sedangkan perolehan skor domain ini pada keadaan eksisting saat ini adalah 97,45. Berdasarkan hal ini, didapatkan besaran kenaikan skor domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 67%.

4.6 DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Fokus pembahasan Domain Gender dan Diskriminasi Kepemudaan melingkupi tiga aspek yaitu :

1. Angka perkawinan usia anak
2. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, dan
3. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

Pengukuran terhadap domain gender dan diskriminasi kepemudaan pada prinsipnya ditujukan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal, terutama pemuda perempuan.

4.6.1 Angka Perkawinan Usia Anak

Isu strategis nasional terkait dengan domain gender dan diskriminasi terletak pada perkawinan usia anak. Isu tersebut memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus anak bawah lima

tahun (balita) yang mengalami stunting. Terdapat korelasi positif antara proporsi pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun dan prevalensi stunting pada balita. Hal ini berarti bahwa prevalensi stunting cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang juga tinggi. Salah satu penjelasannya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi. Perempuan kelompok usia 15–24 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi atau lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Salah satu hal yang dapat menjelaskan variasi tingkat perkawinan usia anak adalah perbedaan tingkat pendidikan antarprovinsi yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah. Adanya korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak. Korelasi negatif tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan rata-rata pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi adalah mereka yang menempuh pendidikan lebih lama dan mendapatkan hasil pembelajaran lebih banyak daripada pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih rendah. Secara rata-rata, pemuda dengan tingkat pendidikan lebih rendah menikah pertama kali pada usia yang lebih muda daripada pemuda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa pendidikan mencegah pernikahan pada usia muda yang berimplikasi pada menurunnya risiko kehamilan pada usia muda dan bayi yang lahir dengan permasalahan gizi. Dengan demikian, secara tidak langsung peningkatan capaian

domain pendidikan diharapkan dapat mencegah permasalahan stunting di Indonesia.

Adapun yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan jumlah perkawinan yang terjadi per desember 2022 adalah sebagai berikut.

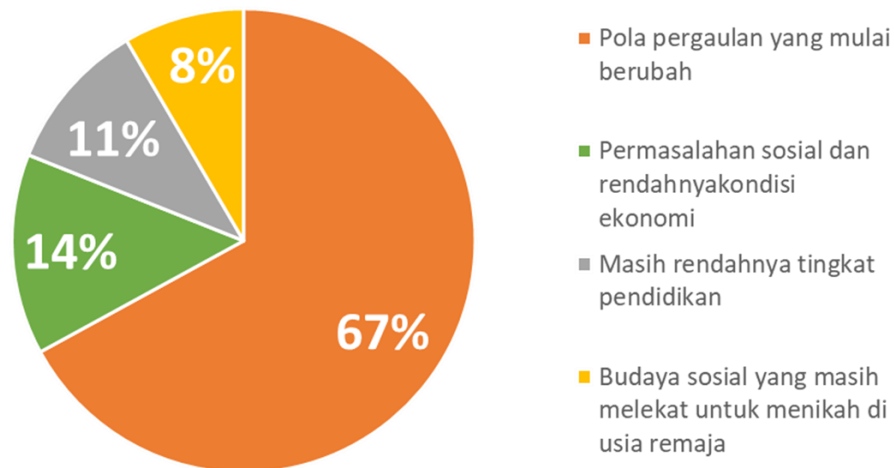
Tabel 4.12 Data Perkawinan di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur Tahun 2022

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Baki	524	4	19	501	11	48	465
2	Bendosari	384	2	34	348	5	54	325
3	Bulu	261	0	23	238	0	43	218
4	Gatak	325	4	16	305	3	25	297
5	Grogol	746	11	34	701	26	68	652
6	Kartasura	649	3	129	517	5	130	514
7	Mojolaban	608	4	28	576	11	70	527
8	Nguter	317	1	2	314	2	14	301
9	Polokarto	563	0	169	394	3	176	384
10	Sukoharjo	622	1	19	602	9	30	583
11	Tawang Sari	350	2	10	338	2	18	330
12	Weru	367	0	24	343	1	74	292
	JUMLAH	5716	32	507	5177	78	750	4888

Sumber: Bima Islam, Kementerian Agama, Kabupaten Sukoharjo, 2023

Ditinjau berdasarkan data perkawinan berdasarkan umur di Kabupaten Sukoharjo di atas, bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 5716 jumlah perkawinan yang terjadi. Berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah KUA adalah minimal usia 19 tahun dimana berdasarkan data diatas terdapat 110 anak dibawah 19 tahun di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang melangsungkan perkawinan. Jika berkaca pada tahun 2022, persentase ini cenderung naik dimana pada tahun 2022 diperoleh persentase pernikahan usia anak di wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 0,055%. Angka ini didapatkan dari perbandingan jumlah perkawinan anak yang terjadi dengan jumlah total pemuda di Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 4.10 Faktor Pernikahan Dini Menurut Hasil Survey

Hasil survei terhadap generasi muda di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa salah satu faktor utama terkait pernikahan dini adalah perubahan dalam pola pergaulan. Sebanyak 67% dari peserta survei menunjukkan adanya perubahan dalam nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda. Sementara itu, faktor-faktor lain yang juga turut berperan, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil, mencakup permasalahan sosial dan kondisi ekonomi yang kurang baik (14%), tingkat pendidikan yang rendah atau

literasi yang kurang (11%), dan budaya sosial yang mendorong pernikahan di usia remaja (8%).

4.6.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA Ke Atas

Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi menjadi tolok ukur penting dalam pembangunan pemuda. Data ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan akses pemuda perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi.

Peningkatan persentase pemuda perempuan yang mengikuti pendidikan menengah dan tinggi memiliki implikasi besar dalam pembangunan pemuda. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya memberikan kesempatan yang setara dalam hal pendidikan bagi kaum perempuan, membawa perubahan signifikan dalam pandangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Partisipasi yang lebih tinggi dalam pendidikan tinggi membuka peluang yang lebih luas bagi pemuda perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih maju, yang nantinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Ini juga memperkuat kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, ilmiah, dan sosial, memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan pemuda, peningkatan partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan tinggi memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan yang lebih efektif di masyarakat. Pendidikan tinggi mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global, memungkinkan

mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan, dan menjadi pemimpin dalam perubahan positif di berbagai sektor.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan menengah dan tinggi menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pembangunan pemuda secara holistik, memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Berikut merupakan rincian data mengenai persentase pemuda Perempuan yang menempuh pendidikan tinggi di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.13 Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA Ke Atas

	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Tinggi	77,4	84	75

Sumber: Data Diolah, 2023

Ditinjau berdasarkan data capaian persentase pemuda Perempuan yang menempuh pendidikan tinggi di Kabupaten Sukoharjo diatas, terjadi tren penurunan pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar 9 poin. Penurunan dalam persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi adalah permasalahan serius dalam pembangunan pemuda. Data ini mencerminkan penurunan akses atau minat kaum perempuan untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, yang berpotensi membatasi potensi pembangunan generasi muda secara keseluruhan.

Penurunan ini dapat memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan pemuda. Ketika persentase pemuda perempuan yang mengakses pendidikan menengah dan tinggi menurun, hal itu dapat membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Ini juga dapat memperburuk kesenjangan gender dalam akses terhadap peluang dan pengetahuan.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dapat menghambat kemampuan kaum perempuan dalam mencapai potensi mereka secara penuh. Hal ini dapat berdampak pada keikutsertaan mereka dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, ilmiah, dan sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

4.6.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan gender dilakukan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak terlindungi dari diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi dalam kehidupan mereka. Selain itu, peningkatan kualitas hidup bagi perempuan dan anak-anak menjadi krusial untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan melibatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.

Dalam ranah ketenagakerjaan, kontribusi aktif perempuan bisa tercermin dari partisipasi mereka dalam lembaga-lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat

keterlibatan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam hal persentase pemuda Perempuan yang bekerja pada sektor formal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, berikut merupakan rincian datanya.

Tabel 4.14 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal	34,64	47,2	50

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa partisipasi pemuda perempuan di sektor formal di wilayah Kabupaten Sukoharjo meningkat sebesar 2,8% dari tahun 2021 ke 2022. Kenaikan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal menjadi representasi penting dalam pembangunan pemuda. Pertumbuhan ini mencerminkan dorongan kuat terhadap inklusi ekonomi dan kesetaraan gender dalam perkembangan generasi muda.

Keterlibatan yang semakin meningkat dari pemuda perempuan dalam sektor formal menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka, memperkuat kemandirian finansial, dan memperluas pilihan karir. Hal ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pribadi, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan, sambil membantu mengurangi kesenjangan gender di tempat kerja. Dalam konteks pembangunan pemuda, pertumbuhan ini menunjukkan komitmen untuk mendorong kesetaraan peluang bagi generasi muda, yang

pada gilirannya dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dan sosial di suatu wilayah.

4.6.4 Skor Sub Indeks dan Nilai Indeks Domain Gender dan Diskriminasi

Sama seperti pada penentuan skor sub indeks dan nilai indeks domain sebetulnya, pada domain gender dan diskriminasi ini perolehan skor didasarkan pada hasil perhitungan akumulasi pada nilai tiap indikator Penyusun domain gender dan diskriminasi pada Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo.

Berikut merupakan hasil perhitungan indeks domain gender dan diskriminasi pada pembangunan pemuda Kabupaten Sukoharjo.

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Gender dan Diskriminasi								
1	Angka perkawinan usia anak	0	45	0,055		1,00	1,00	
2	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100	75	6,67	0,33	6,67	
3	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	50	8,33	0,17	8,33	
Nilai Domain 5								53,33

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan pada perhitungan indikator Penyusun domain gender dan diskriminasi, diperoleh nilai domain sebesar 53,33. Apabila berkaca pada perolehan nilai domain gender dan diskriminasi pada perhitungan IPP Kabupaten

Sukoharjo tahun 2022, diperoleh nilai domain sebesar 55,24. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tren penurunan nilai domain sebesar 1,91 poin.

Pada domain pembangunan pemuda yang berkaitan dengan gender dan diskriminasi, terdapat penurunan nilai yang mengindikasikan adanya tantangan dan permasalahan yang mungkin muncul. Penurunan ini bisa menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlakuan gender atau mungkin terjadi diskriminasi terhadap pemuda berdasarkan jenis kelamin. Data-data yang menunjukkan penurunan dalam domain ini mungkin mencerminkan bahwa upaya untuk menangani isu-isu gender dan diskriminasi belum memberikan hasil optimal. Hal ini bisa mempengaruhi hak-hak pemuda, terutama dalam hal kesetaraan gender, perlindungan dari diskriminasi, serta akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya.

Penurunan nilai di domain gender dan diskriminasi pada pembangunan pemuda menandakan bahwa ada perlunya lebih banyak perhatian dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan tanpa diskriminasi. Diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender, memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan, dan juga menekan segala bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi di berbagai aspek kehidupan pemuda. Ini merupakan panggilan untuk lebih fokus dalam memperkuat kebijakan dan program-program yang mendukung hak-hak pemuda, terutama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang gender atau latar belakang sosial mereka.

4.7 KOMPILASI CAPAIAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada masing – masing domain penyusun nilai Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2023, diperoleh kompilasi nilai domain yang menjadi skor IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar 54,66. Berikut merupakan rincian data domain Penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Tabel 4.15 Nilai Domain IPP Kabupaten Sukoharjo, 2023

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Skor Indikator	Nilai Domain
Domain Pendidikan								
1	Rata-rata lama sekolah	0	15	9,62	6,41	(0,60)	6,41	
2	APK sekolah menengah	0	100	81,59	8,16	0,18	8,16	
3	APK perguruan tinggi	0	100	39	3,90	0,61	3,90	
Nilai Domain 1								61,57
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan								
4	Angka kesakitan pemuda	0	20	9,46		0,53	0,53	
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,024		0,99	0,99	
6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	31,84		0,12	0,12	
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	0,5		0,99	0,99	
Nilai Domain 2								6,56
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja								
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	2	10,00	-	10,00	
9	TPT pemuda	0	28	3,32		0,57	0,57	
Nilai Domain 3								54,41
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan								
10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	92,35	9,60	0,04	9,60	
11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	45	10,00	-	10,00	

No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Persamaan 1	Persamaan 2	Skor Indikator	Nilai Domain
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	25	10,00	-	10,00	
Nilai Domain 4								97,45
Domain Gender dan Diskriminasi								
13	Angka perkawinan usia anak	0	45	0,055		1,00	1,00	
14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100	75	6,67	0,33	6,67	
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	50	8,33	0,17	8,33	
Nilai Domain 5								53,33
Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023								54,66

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan data rincian perhitungan domain Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2023 di atas, diperoleh skor nilai IPP Kabupaten Sukoharjo 2023 sebesar 54,66. Besaran nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 didasarkan pada perhitungan dari kelima domain Penyusun IPP dimana domain Partisipasi dan kepemimpinan menjadi domain yang memiliki kontribusi paling besar dalam hasil skor IPP Kabupaten Sukoharjo. **Hasil perhitungan tersebut menunjukkan adanya kenaikan Nilai IPP dari tahun 2022 (52,53) sebesar 2,13 menjadi 54,66 pada tahun 2023.**

Apabila ditinjau berdasarkan capaian skor nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dimana berhasil mencapain skor 52,53, tentu saja dapat dikatakan bahwa terjadi tren kenaikan pada skor nilai IPP Kabupaten. Meningkatnya capaian nilai skor IPP Kabupaten Sukoharjo ini tentunya menjadi salah satu catatan positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Capaian IPP yang meningkat menunjukkan adanya investasi yang kuat dalam penyediaan akses dan fasilitas bagi pemuda, memastikan mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesempatan dalam kegiatan sosial, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Langkah-langkah kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup pemuda, memastikan keterlibatan mereka dalam berbagai aspek pembangunan, serta memberikan dukungan yang lebih besar terhadap kesetaraan gender, semuanya berkontribusi pada peningkatan nilai IPP. Dengan kenaikan ini, dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan pemuda telah memberikan dampak positif dan memberi harapan akan masa depan yang lebih baik bagi pemuda di wilayah tersebut.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nilai capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebesar **54,66**.
2. Peningkatan yang cukup berarti pada IPP tahun 2023 disebabkan oleh perbaikan dalam metode perhitungan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap data pendukung. Ini merupakan hasil positif dari proses perhitungan IPP tahun sebelumnya, yang memungkinkan perbaikan yang merata pada tahun 2023.
3. Nilai capaian per domain penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut.
 - a. Domain Pendidikan = 61,57
 - b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan = 6,56
 - c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja = 54,41
 - d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan = 97,45
 - e. Domain Gender dan Diskriminasi = 53,33
4. Dari hasil perhitungan pada IPP Kabupaten Sukoharjo 2023, diperoleh perbandingan dengan Nilai IPP Nasional dan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah dimana nilai IPP Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi 1,33 poin dari nilai IPP Jawa Tengah dan lebih rendah 0,67 poin dari nilai IPP Nasional.

5.2 REKOMENDASI

Tentunya dari hasil perhitungan skor IPP, maka beberapa domain yang perlu menjadi landasan dalam pengembangan kedepannya antara lain:

1. Rata-rata lama sekolah yang masih berada di angka 9,62 dari target nasional 15
2. APK Perguruan Tinggi 39 dari 100
3. Angka kesakitan pemuda 9,46 dari 0
4. TPT pemuda 3,32 dari batas minimum 0
5. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi 75 dari target 100

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2021. "INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2021."
- Efendi, Achmad. 2020. "Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (Ipp) Dengan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia." *Jurnal Paradigma* 9(1): 39–48. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/4381>.
- Al Izzati, Ridho, Sri Murniati, and Rika Kumala Dewi. 2022. "Indeks Pembangunan Pemuda 2022." : 1–93. www.smeru.or.id.
- Muryadi, Agustanico Dwi. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pemuda Dan Olahraga Di Indonesia." *Proceedings of the National Seminar on Women's Gait in sports towards a healthy lifestyle (April)*: 1–6.
- Naviah, Nita Imroatul. 2020. "Sejarah Peran Pemuda Dalam Pergerakan Indonesia."
- Arrial Thoriq Setyo Rifano. 2017. "Membangun Kebijakan Pro-Pemuda." *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* 5(1): 73–75.
- Usluhuddin. 2022. "Peran Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan." 2(1): 180–97.